



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 244 TAHUN 2024

**TENTANG
PENETAPAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2023-2024**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, maka diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mewujudkan akselerasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pimpinan Instansi Pusat perlu menetapkan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah 2023-2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 2023-2024.

- KESATU : Menetapkan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan, untuk menghasilkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik LKPP yang terintegrasi.
- KETIGA : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terintegrasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai dokumen hidup (*living document*) dapat disesuaikan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah yang selaras dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH 2023-2024

NOMOR : 244 TAHUN 2024

TANGGAL : 30 Agustus 2024

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pengguna SPBE adalah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan. Pelaksanaan SPBE harus dilakukan dengan 7 prinsip, yaitu efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Efektivitas yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. Keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE. Kesinambungan sebagai keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya. Efisiensi menjadi bentuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna. Akuntabilitas menjadi wujud kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE. Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses

bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE. Keamanan menjadi wujud kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Dalam rangka memberikan layanan SPBE yang terintegrasi, maka harus didukung arsitektur SPBE yaitu kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE. Arsitektur SPBE terdiri atas Arsitektur SPBE Nasional yang diterapkan secara nasional, arsitektur SPBE Instansi Pusat dan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Pengelolaan Layanan SPBE dilakukan oleh wali layanan di tingkat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Arsitektur SPBE Nasional. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam setiap Arsitektur SPBE memuat 2 (dua) komponen, yaitu:

1. Referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur;
2. Domain arsitektur, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.

Arsitektur SPBE Nasional memuat:

1. Arah kebijakan dan strategi
2. Kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional
3. Referensi Arsitektur SPBE Nasional
4. Domain Arsitektur SPBE Nasional
5. Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional

B. Tujuan

Sejalan dengan Arsitektur SPBE Nasional, tujuan disusunnya Arsitektur SPBE LKPP adalah:

1. Memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu; dan
2. Mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi.

C. Landasan Penyusunan Arsitektur SPBE

Landasan yang digunakan dalam menyusun Arsitektur adalah landasan yuridis dan landasan arsitektur.

1. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis penyusunan Arsitektur SPBE LKPP adalah:

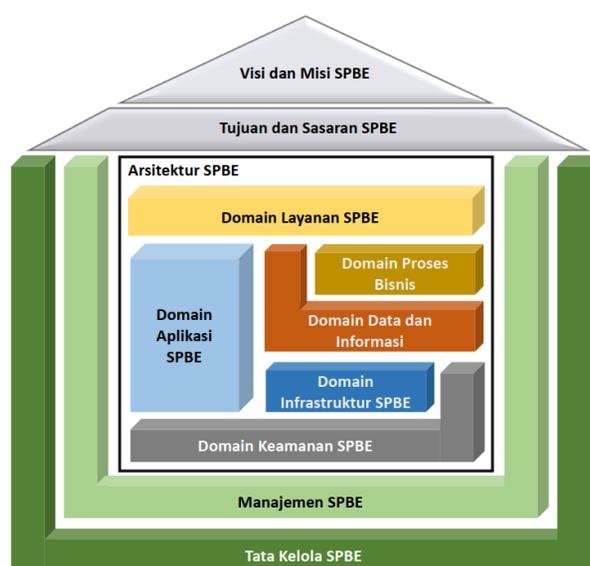
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- c. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- e. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- f. Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- g. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
- h. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- j. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- l. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024.
- m. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2. Arsitektur SPBE Nasional

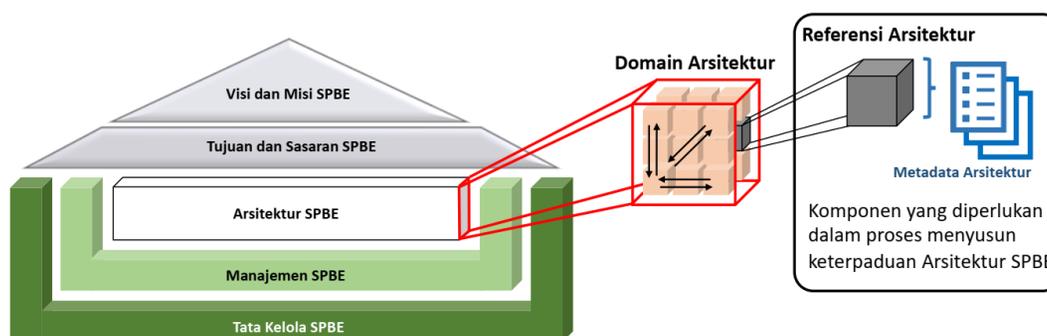
Penerapan SPBE dilaksanakan sesuai dengan kerangka kerja SPBE sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kerangka kerja SPBE pada dasarnya merupakan sebuah struktur yang didesain sedemikian rupa, sebagai konseptualisasi atas pelaksanaan tata kelola SPBE, yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan penerapan SPBE, baik di level nasional, maupun di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diharapkan dapat diwujudkan melalui tata kelola SPBE. Tata kelola SPBE diterapkan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Unsur-unsur SPBE ini antara lain: rencana induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, peta rencana SPBE (memuat rencana SPBE mengenai penerapan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi), rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.

Sebagai salah satu unsur SPBE, Arsitektur SPBE Nasional memberikan keterpaduan dari seluruh Domain Arsitektur SPBE Nasional yang terdiri dari domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE dan domain arsitektur layanan SPBE. Keterpaduan seluruh unsur-unsur SPBE di atas dapat diwujudkan dalam sebuah kerangka kerja SPBE yang di dalamnya memuat Arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur SPBE Nasional menggambarkan keterpaduan proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional dan kedudukannya dalam kerangka kerja SPBE terdapat pada Gambar I.1.



Gambar I.1 Kerangka kerja Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE Nasional merupakan Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional, melalui pengintegrasian seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik, dengan menggambarkan secara terpadu, pada seluruh domain di dalamnya, sehingga memberikan kemudahan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Arsitektur SPBE Nasional memberikan panduan dalam tata kelola SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE memiliki pola yang dapat menghasilkan layanan digital pemerintah terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi SPBE, dimulai dengan melakukan identifikasi layanan pemerintah terintegrasi dari domain proses bisnis, domain data dan informasi, serta domain layanan SPBE, yang selanjutnya akan didukung oleh aspek teknologi informasi dan komunikasi melalui domain aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Untuk melakukan identifikasi pada setiap domain, maka pada setiap domain terdapat struktur bertingkat, yang terbentuk dari berbagai komponen dasar yang disebut dengan referensi arsitektur, untuk memastikan relasi antar domain dan keselarasan antara Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, yang merupakan deskripsi dari setiap substansi domain arsitektur SPBE, sebagaimana terlihat pada ilustrasi pada Gambar I.2.



Gambar 1.2 Komponen dalam Arsitektur SPBE

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusunan Arsitektur SPBE LKPP mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional. Terdapat 2 acuan yang sebagai landasan dalam membangun Arsitektur SPBE, yaitu referensi arsitektur dan domain arsitektur. Referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.

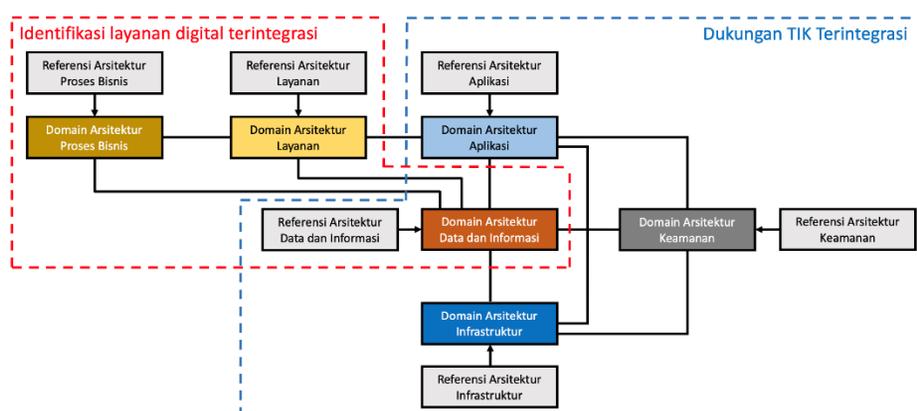
Pada arsitektur SPBE Nasional yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat Taksonomi Referensi Arsitektur SPBE, yang terdiri dari:

- a. Referensi Proses Bisnis (RAB). RAB digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. RAB SPBE Nasional terdiri dari 9 (sembilan) sektor pemerintahan di tingkat 1 (satu) dan 46 (empat puluh enam) urusan pemerintahan di tingkat 2 (dua).
- b. Referensi Data dan Informasi (RAD). RAD merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan. RAD SPBE Nasional terdiri dari 10 (sepuluh) data pokok di tingkat 1 (satu) dan 50 (lima puluh) data tematik di tingkat 2 (dua).
- c. Referensi Layanan SPBE (RAL). RAL adalah sistem pengklasifikasian layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu. RAL terdiri dari 2 (dua) domain layanan di tingkat 1 (pertama) dan 54 (lima puluh empat) area layanan di tingkat 2 (kedua).
- d. Referensi Aplikasi SPBE (RAA). RAA adalah kerangka kerja untuk mengategorikan aplikasi untuk membantu dalam identifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi dari aplikasi. RAA terdiri dari 2 (dua) domain aplikasi di tingkat 1 dan 4 (empat) area di tingkat 2. RAA menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur aplikasi.
- e. Referensi Infrastruktur SPBE (RAI). Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi

data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. RAI terdiri dari 3 (tiga) domain di tingkat 1 dan 7 (tujuh) area di tingkat 2. RAI menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur infrastruktur TIK.

- f. Referensi Keamanan SPBE (RAK). RAK pada SPBE disusun dengan maksud sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi IPPD. RAK terdiri dari 3 (tiga) domain keamanan di tingkat 1 dan 10 (sepuluh) area keamanan di tingkat 2.

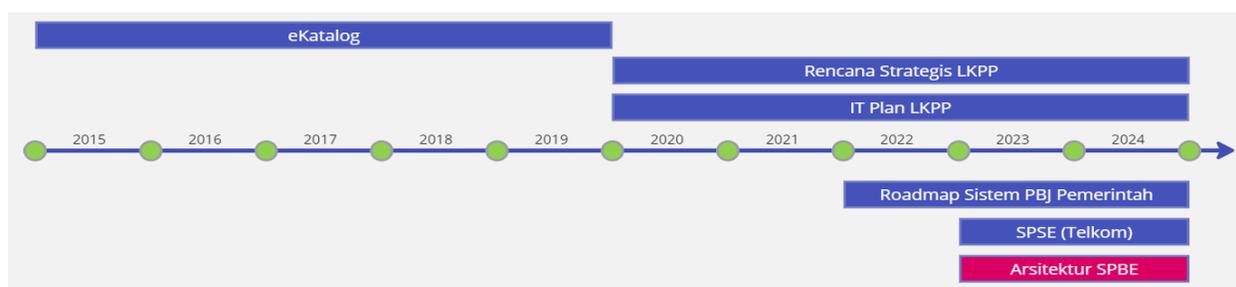
Arsitektur SPBE Nasional terdapat 6 (enam) domain referensi arsitektur yang mempunyai saling keterkaitan yang erat. Keterkaitan antar referensi arsitektur dimulai dari domain proses bisnis, yakni sebuah urusan pemerintah pada dasarnya akan memiliki data dan informasi di dalamnya. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, penggunaan data dan informasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan layanan, di mana layanan akan berbasis elektronik, berupa aplikasi yang berjalan di atas infrastruktur TIK berbagi pakai yang handal dan aman. Keterkaitan antar domain dan dengan referensi arsitektur SPBE dapat dilihat pada Gambar I.3.



Gambar I.3 Keterkaitan Antar Komponen dalam Arsitektur SPBE

D. Keselarasan Arsitektur dengan Dokumen Terkait

Penyusunan Arsitektur SPBE LKPP, yang merupakan turunan dari Arsitektur SPBE Nasional, diselaraskan juga dengan dokumen terkait, termasuk e-Katalog, Rencana strategis LKPP 2020-2024, IT Plan LKPP 2020-2024, Roadmap Sistem PBJ Pemerintah dan SPSE, seperti terlihat pada Gambar I.4.



Gambar I.4 Keselarasan Arsitektur SPBE dengan Dokumen Terkait

E. Metodologi Penyusunan Arsitektur SPBE

Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana mengacu pada Perpres 95/2018 tentang SPBE dan Perpres 132/2022 tentang Arsitektur SPBE, yang terdiri dari 6 (enam) domain, yaitu:

1. Domain Arsitektur Proses Bisnis
2. Domain Arsitektur Data dan Informasi
3. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE
4. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE
5. Domain Arsitektur Keamanan SPBE
6. Domain Arsitektur Layanan SPBE

Metode yang diterapkan dalam menyusun Arsitektur SPBE adalah:

1. Studi pustaka, terutama untuk menyelaraskan arsitektur SPBE dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait SPBE yang sebelumnya
2. Melengkapi kebutuhan data dalam penyusunan Arsitektur SPBE melalui pengisian lembar kerja
3. Wawancara
4. Evaluasi dan Konfirmasi permasalahan dan rekomendasi penyelesaian

F. Tahapan Penyusunan Arsitektur SPBE

Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Persiapan Kegiatan, yang meliputi analisis kebutuhan dan kesepakatan luaran dokumen
2. Pengumpulan Dokumen Eksisting, didapatkan melalui website LKPP dan dokumen yang dimiliki Pusdatin
3. Penjelasan pengisian Lembar Kerja
4. Pengisian Lembar Kerja
5. Verifikasi isi Lembar Kerja
6. Penyusunan Arsitektur SPBE Eksisting SPBE dan Analisis
7. Penyusunan Peta Rencana

BAB II

TARGET SPBE YANG INGIN DICAPAI

A. Visi, Misi dan Tujuan LKPP

Visi, Misi dan Tujuan LKPP mengacu pada Rencana Strategis LKPP tahun 2020-2024 pada Peraturan Lembaga Nomor 4 tahun 2023.

1. Visi LKPP

Sebagai upaya untuk mendukung visi misi presiden, LKPP memiliki visi yaitu: “Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam rumusan visi di atas, makna yang terkandung dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa, dimaknai sebagai peran LKPP yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengembangan, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang PBJ yang menjadi dasar untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga sesuai dengan prinsip dan tujuan pengadaan yang memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
- b. Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, dimaknai sebagai perwujudan Visi LKPP yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden.

2. Misi LKPP

Untuk mencapai visi tersebut, LKPP melaksanakan Misi Pertama Presiden, Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Misi Kedua Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing serta Misi Kedelapan, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya yang dirumuskan ke dalam 3 (tiga) misi, yaitu:

- a. Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi;
- b. Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan
- c. Meningkatkan akuntabilitas PBJ.

Dalam rumusan misi di atas, makna yang terkandung dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi, dimaknai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan salah satu fungsi untuk melakukan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang transformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital.
- b. Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM yang adaptif, dimaknai sebagai proses pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan melalui penggunaan sistem pengadaan secara elektronik sebagai bentuk percepatan PBJP dan agar meningkatnya independensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan yang juga dilaksanakan oleh SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi.
- c. Meningkatkan akuntabilitas PBJ, dimaknai sebagai suatu upaya LKPP dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan PBJP secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik.

3. Tujuan LKPP

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, dan memperhatikan kondisi, hasil evaluasi dan capaian serta dinamika dalam pelaksanaan Renstra yang telah berjalan, pada perubahan Renstra saat ini LKPP menetapkan 2 (dua) tujuan pada tahun 2023-2024 yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, melalui realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K dan PDN.
- b. Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP yang ditunjukkan dengan meningkatnya hasil evaluasi penilaian reformasi birokrasi sebagai cermin dari terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

B. Visi, Misi dan Tujuan SPBE LKPP

Secara umum Visi, Misi dan Tujuan SPBE LKPP adalah memberikan dukungan terhadap Visi, Misi dan Tujuan LKPP.

1. Visi SPBE LKPP

Sebagai upaya untuk mendukung visi misi Presiden, LKPP memiliki visi SPBE yaitu: “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terintegrasi sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

2. Misi SPBE LKPP

Untuk mencapai visi di atas, LKPP merumuskan ke dalam 3 (tiga) misi, yaitu:

- a. Menerapkan SPBE terintegrasi dalam mendukung terciptanya kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi;
- b. Mengembangkan inovasi proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan
- c. Menerapkan SPBE terintegrasi untuk meningkatkan akuntabilitas PBJ.

3. Tujuan SPBE LKPP

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi SPBE LKPP, dan memperhatikan kondisi, hasil evaluasi dan capaian serta dinamika dalam pelaksanaan Renstra yang telah berjalan, LKPP menetapkan 2 (dua) tujuan SPBE pada tahun 2023-2024 yaitu:

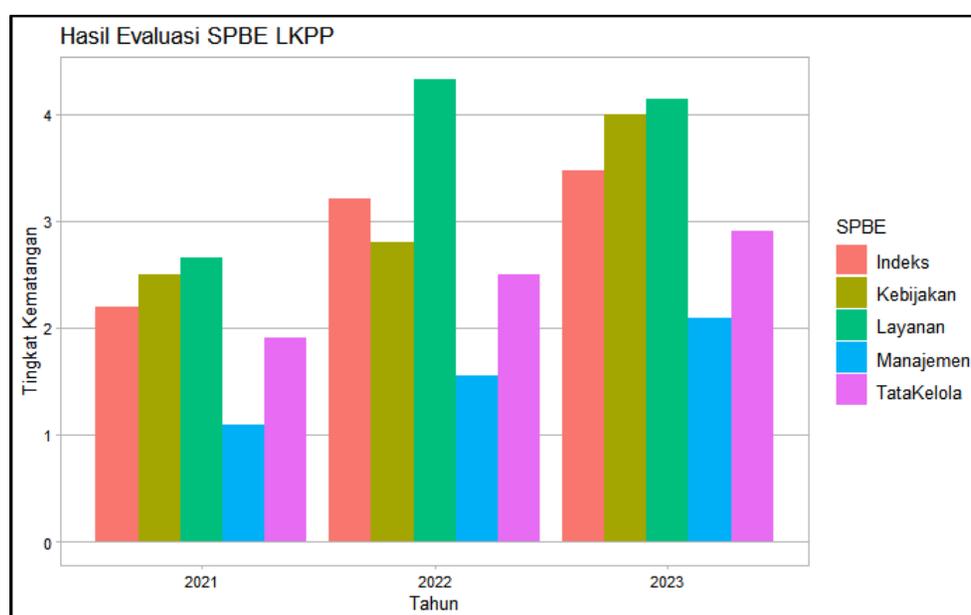
- a. Meningkatkan penerapan SPBE terintegrasi yang mendukung meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, melalui realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K dan PDN.
- b. Meningkatkan penerapan SPBE terintegrasi yang mendukung meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP yang ditunjukkan dengan meningkatnya hasil evaluasi penilaian reformasi birokrasi dan evaluasi SPBE sebagai cermin dari terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

C. Indeks SPBE LKPP

Indeks kematangan SPBE LKPP menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Kontribusi peningkatan indeks, secara signifikan diberikan oleh layanan publik berbasis elektronik yang didukung oleh aplikasi berbagi pakai. Peningkatan signifikan lainnya juga terjadi pada domain kebijakan, ditunjukkan pada Tabel II.1 dan Gambar II.1.

Tabel II.1 Histori Indeks Kematangan SPBE LKPP

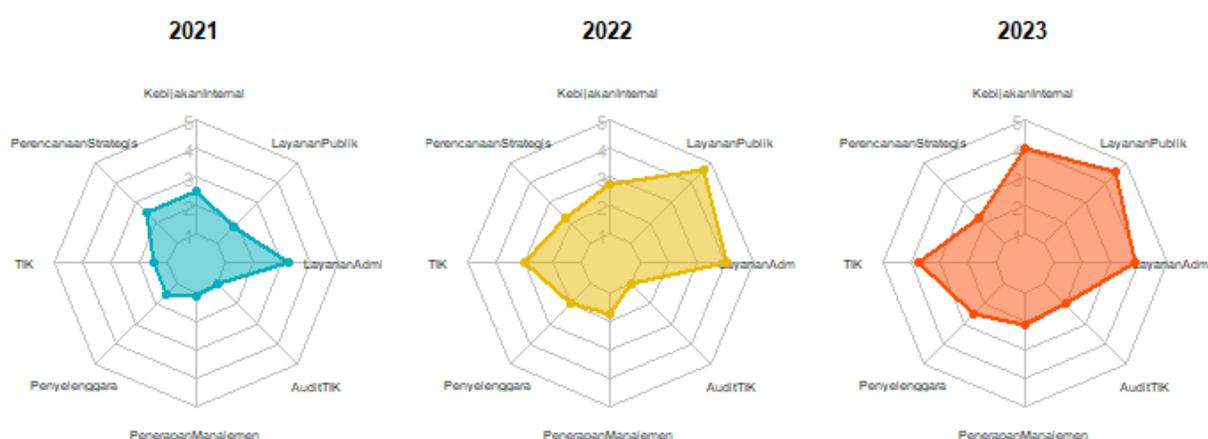
Indeks, Domain dan Aspek SPBE	2021	2022	2023
Indeks SPBE	2,19	3,21	3,47
Domain Kebijakan SPBE	2,50	2,80	4,00
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,50	2,80	4,00
Domain Tata Kelola SPBE	1,90	2,50	2,90
Perencanaan Strategis SPBE	2,50	2,25	2,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,50	3,00	3,75
Penyelenggara SPBE	1,50	2,00	2,50
Domain Manajemen SPBE	1,09	1,55	2,09
Penerapan Manajemen SPBE	1,13	1,75	2,13
Audit TIK	1,00	1,00	2,00
Domain Layanan SPBE	2,66	4,32	4,14
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,20	4,10	3,90
Layanan Publik Berbasis Elektronik	1,83	4,67	4,50



Gambar II.1 Indeks Kematangan SPBE LKPP 2021-2023

D. Indeks Kematangan SPBE yang Ingin Dicapai

Tingkat kematangan SPBE suatu instansi tidak semata-mata ditentukan oleh indeks SPBE. Jika dilihat dari keberlanjutan SPBE, tidak hanya dilihat dari indeks total, melainkan juga dari keseimbangan antara indeks SPBE tiap domain SPBE. Semakin merata nilai tiap domainnya maka semakin tinggi pula tingkat keberlanjutannya. Berdasarkan indeks SPBE LKPP tiga tahun terakhir 2021, 2022, 2023, terlihat pada Gambar II.2, masih terjadi ketimpangan indeks antar domain SPBE, yaitu domain kebijakan, domain tata kelola, domain manajemen dan domain layanan.



Gambar II.2 Keseimbangan Indeks Kematangan SPBE

Peningkatan perlu dilakukan untuk domain tata kelola dan domain manajemen SPBE, terutama untuk aspek yang masih memiliki indeks di bawah tiga. Aspek-aspek tersebut adalah aspek Perencanaan Strategis SPBE, Penyelenggara SPBE, Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK. Oleh karena itu, target yang ingin dicapai adalah menjadikan indeks SPBE untuk keempat aspek tersebut minimal memiliki tingkat kematangan tiga. Sehingga, indeks SPBE keseluruhan yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2024 adalah 3,72 seperti terlihat pada Tabel II.2.

Tabel II.2 Target Indeks Kematangan SPBE 2024

Indeks, Domain dan Aspek SPBE	2023	2024
Indeks SPBE	3,47	3,72
Domain Kebijakan SPBE	4,00	4,00
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	4,00	4,00
Domain Tata Kelola SPBE	2,90	3,30
Perencanaan Strategis SPBE	2,25	3,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,75	3,75
Penyelenggara SPBE	2,50	3,00
Domain Manajemen SPBE	2,09	3,00

Indeks, Domain dan Aspek SPBE	2023	2024
Penerapan Manajemen SPBE	2,13	3,00
Audit TIK	2,00	3,00
Domain Layanan SPBE	4,14	4,14
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,90	3,90
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,50	4,50

BAB III ARSITEKTUR SPBE

A. Arsitektur Layanan

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dikatakan bahwa layanan adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Sedangkan pengguna SPBE adalah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan. Dapat dilihat bahwa layanan menggunakan asas manfaat yang dihasilkan (*benefits*) untuk para penggunanya.

Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Untuk itu domain layanan diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat. Dalam hal ini jika penerima manfaat tersebut adalah masyarakat seperti penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dunia usaha seperti penerapan cipta kerja (eksternal dari pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan publik (*Government to Citizen/G2C* dan *Government to Business /G2B*) dan bila penerima manfaat tersebut adalah instansi pemerintah ataupun aparatur negara (internal pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai layanan administrasi pemerintahan (*Government to Government/G2G*, *Government to Employee/G2E*).

Arsitektur layanan SPBE yang dijabarkan pada bagian ini mengacu pada indikator tingkat kematangan SPBE yaitu Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik.

1. Layanan Administrasi Pemerintahan

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan,

pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik ini sejalan dengan Perpres 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pada indikator 32-41, seperti pada Tabel III.1.

Tabel III.1 Indikator layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator	Nama Indikator
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan BMN/BMD
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai

2. Layanan Publik

Layanan Publik Berbasis Elektronik berdasarkan pada Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan layanan yang ditujukan untuk mendukung instansi lain atau masyarakat publik untuk mendukung tugas dan fungsi dari setiap pemberi layanan. Layanan publik berbasis elektronik dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum. Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat beberapa indikator domain layanan publik SPBE, seperti terlihat pada Tabel III.2.

Tabel III.2 Indikator Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator	Indikator Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3

Berdasarkan indikator layanan publik berbasis elektronik, layanan publik dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu layanan publik umum dan layanan publik sektoral. Acuan yang digunakan untuk layanan sektoral adalah layanan khusus di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

LKPP mempunyai visi untuk mewujudkan Pelayanan Publik di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel. Sejalan dengan visinya, maka LKPP memiliki misi, yaitu:

- 1) Menyediakan Pelayanan Publik di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang akurat dan informatif.
- 2) Menyediakan sistem dan sarana-prasarana yang mempermudah Pelayanan Publik di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3) Menciptakan inovasi pelayanan yang berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 26 Tahun 2022 tentang standar layanan di LKPP. Standar pelayanan ini digunakan sebagai acuan oleh setiap unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pimpinan Unit Organisasi di LKPP melakukan pengawasan atas penerapan Standar Pelayanan di unit organisasinya. Standar pelayanan dapat dilihat pada Tabel III.3.

Tabel III.3 Standar Layanan Publik LKPP

No	Penanggung-jawab	Pelayanan Publik	Bentuk Layanan
1	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Pelayanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) melalui <i>desk</i> layanan	PID dan Audiensi (01)
2	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Pelayanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) melalui <i>website</i>	
3	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Fasilitasi Pelayanan Audiensi dan Kunjungan Kerja di LKPP	
4	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Pelayanan Penafsiran Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Konsultasi dan Pendampingan (02)
5	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan	Pelayanan Konsultasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, <i>Monitoring</i> Evaluasi Pengadaan dan Sanksi Daftar Hitam	
6	Direktorat Pasar Digital Pengadaan	Pelayanan Konsultasi Katalog Elektronik dan Toko Daring	
7	Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah	Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak melalui Surat, Tatap Muka dan <i>Website</i>	
8	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	Pelayanan Pemberian Keterangan Ahli	

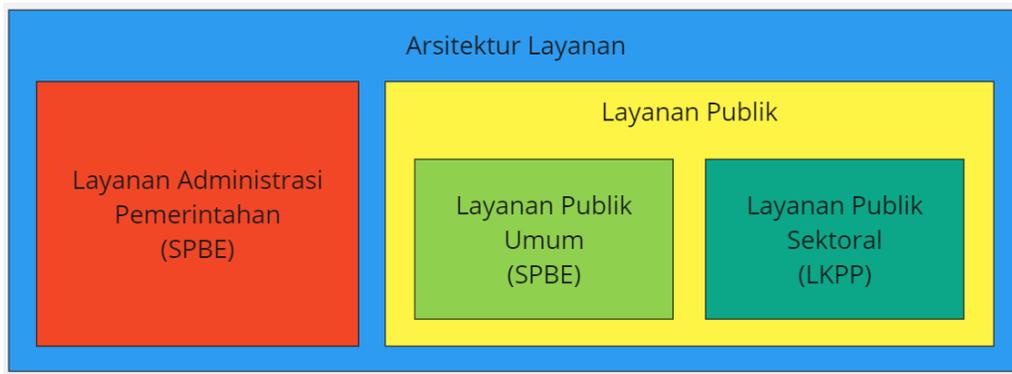
No	Penanggung-jawab	Pelayanan Publik	Bentuk Layanan
9	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Pelayanan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Luring/Tatap Muka dan Daring	Diseminasi/ Sosialisasi/ Pelatihan (03)
10	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Pelayanan Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)	
11	Direktorat Perencanaan Transformas, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan	Pelayanan Sosialisasi/ Bimbingan Teknis Rencana Umum Pengadaan, Monitoring Evaluasi Pengadaan, dan Sanksi Daftar Hitam	
12	Direktorat Pasar Digital Pengadaan	Pelayanan Sosialisasi/ Bimbingan Teknis Mengenai Katalog Elektronik dan Toko Daring	
13	Direktorat Sistem Pengadaan Digital	Pelayanan Permohonan Sosialisasi/ Bimbingan Teknis mengenai Sistem Pengadaan Secara Elektronik	
14	Direktorat Sistem Pengadaan Digital	Pelayanan Bimbingan Teknis LPSE SPSE dan Bimbingan Teknis LPSE <i>Admin System</i> di LKPP	
15	Direktorat Sistem Pengadaan Digital	Pelayanan Bimbingan Teknis Standarisasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) di LKPP	
16	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar <i>Blended Learning</i>	

No	Penanggung-jawab	Pelayanan Publik	Bentuk Layanan
17	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Fasilitator PBJ Tingkat Dasar	
18	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di Desa	
19	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha	
20	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa	
21	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pertama, Muda, dan Madya	
22	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Okupasi Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa, Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen, Okupasi Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, dan Okupasi Pejabat Pengadaan	
23	Direktorat Sistem Pengadaan Digital	Pelayanan Dukungan Penggunaan SPSE melalui LPSE <i>Support</i> , Tatap Muka dan <i>Call center</i>	Dukungan Aplikasi pengadaan (4)
24	Direktorat Pengembangan	Pelayanan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan	Pengembangan Profesi dan

No	Penanggung-jawab	Pelayanan Publik	Bentuk Layanan
	Profesi dan Kelembagaan	Barang/Jasa oleh Tim Penilai Pusat atau Tim Penilai LKPP	Kelembagaan PBJ (5)
25	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Pelayanan Verifikasi Penilaian Mandiri Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
26	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Pelayanan Permohonan Pembinaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
27	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Pelayanan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ)	Akreditasi dan Sertifikasi (6)
28	Direktorat Sertifikasi Profesi	Pelayanan Sertifikasi Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
29	Direktorat Sertifikasi Profesi	Pelayanan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa	

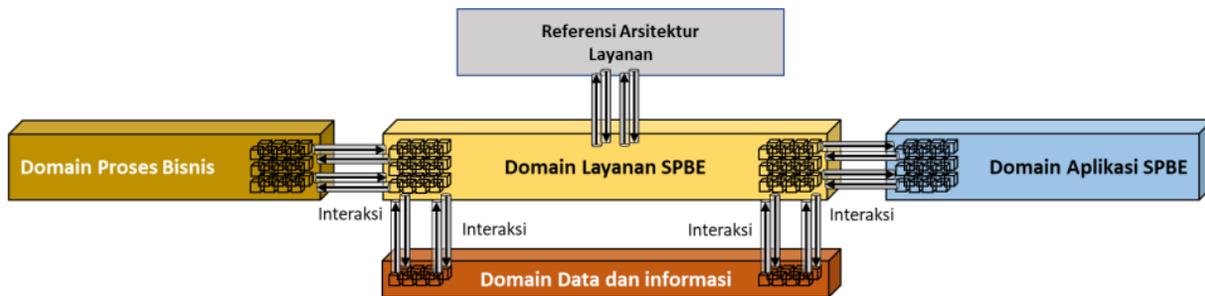
3. Arsitektur Layanan Eksisting

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penyusunan Arsitektur Layanan disusun berdasarkan pada Layanan Administrasi Pemerintahan, Layanan Publik Umum dan layanan Publik Sektoral. Layanan Administrasi Pemerintahan dan layanan Publik umum, merupakan yang layanan yang secara umum seharusnya diberikan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk LKPP. Dua layanan publik ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022. Sedangkan layanan Publik sektoral adalah layanan publik yang diberikan oleh sektor tertentu berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, termasuk LKPP, Gambar III.1. Layanan publik sektoral yang diberikan oleh LKPP adalah layanan publik yang berhubungan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu layanan ini mengacu pada kebijakan di lingkungan LKPP, dalam hal ini, Keputusan Kepala LKPP Nomor 26 Tahun 2022.



Gambar III.1 Arsitektur Layanan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Arsitektur SPBE terdiri atas Referensi Arsitektur SPBE dan Domain Arsitektur SPBE, yaitu keterkaitan antara domain arsitektur dengan domain arsitektur lain dan referensi arsitektur. Relasi langsung domain arsitektur layanan dapat dilihat pada Gambar III.2



Gambar III.2 Relasi Langsung pada Domain Layanan SPBE

Pada Arsitektur layanan hanya dijabarkan relasi langsung dengan referensi arsitektur layanan dan dengan domain arsitektur proses bisnis, sedangkan relasi dengan domain aplikasi dan data dan informasi, dijelaskan ketika menjabarkan domain arsitektur aplikasi dan domain arsitektur data dan informasi. Domain Arsitektur layanan eksisting LKPP dapat dilihat pada Tabel III.4.

Tabel III.4 Arsitektur Layanan Eksisting

ID (LKPP-DAL)	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Kerja	Proses Bisnis Terkait	Referensi Arsitektur Layanan (RAL)
01	PID dan Audiensi	Untuk memberikan pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui <i>desk layanan</i> dan <i>website</i>	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	LKPP-DAB-02.04.08, LKPP-DAB-03.02.01, LKPP-DAB-03.07.02	RAL.01.43.04 Pengelolaan Informasi Publik
01.01	Pelayanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) melalui desk layanan (1)	Untuk memberikan Informasi publik yang dimiliki Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Desk Layanan.	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	LKPP-DAB-02.04.08, LKPP-DAB-03.02.01, LKPP-DAB-03.07.02	RAL.01.43.04 Pengelolaan Informasi Publik
01.02	Pelayanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) melalui website (2)	Untuk memberikan Informasi publik yang dimiliki Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Website.	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	LKPP-DAB-02.04.08, LKPP-DAB-03.02.02, LKPP-DAB-03.07.02	RAL.01.43.04 Pengelolaan Informasi Publik
01.03	Fasilitasi Pelayanan Audiensi dan	Untuk memberikan fasilitasi	Biro Hubungan	LKPP-DAB-02.04.08,	RAL.01.43.04 Pengelolaan Informasi Publik

ID (LKPP- DAL)	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Kerja	Proses Bisnis Terkait	Referensi Arsitektur Layanan (RAL)
	Kunjungan Kerja di LKPP (3)	audiensi dan kunjungan kerja	Masyarakat dan Umum	LKPP-DAB- 03.02.02	
02	Konsultasi dan Pendampingan	Untuk memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan terkait PBJ		LKPP-DAB- 02.01.01, LKPP-DAB- 02.04.05, LKPP-DAB- 02.04.06, LKPP-DAB- 02.04.07, LKPP-DAB- 03.01.01	RAL.01.28.01 Penyelenggaraan Peraturan dan Perundang- undangan
02.01	Pelayanan Penafsiran Peraturan Perundang- undangan tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (4)	Untuk memberikan jawaban atas penafsiran peraturan perundang- undangan di bidang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Direktorat Pengembang an Strategi dan Kebijakan Umum	LKPP-DAB- 02.01.01, LKPP-DAB- 02.04.05, LKPP-DAB- 03.01.01	RAL.01.28.01 Penyelenggaraan Peraturan dan Perundang- undangan
02.02	Pelayanan Konsultasi Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa, Monitoring Evaluasi Pengadaan dan Sanksi Daftar Hitam (5)	Untuk memberikan saran, pendapat dan rekomendasi atas permasalahan yang disampaikan	Direktorat Perencanaan Transformasi , Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan	LKPP-DAB- 02.04.05	RAL.01.28.01 Penyelenggaraan Peraturan dan Perundang- undangan

ID (LKPP- DAL)	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Kerja	Proses Bisnis Terkait	Referensi Arsitektur Layanan (RAL)
02.03	Pelayanan Konsultasi Katalog Elektronik dan Toko Daring (6)	Untuk memberikan penjelasan, pemberian saran, rekomendasi dan/atau pendapat kepada para pihak dalam pelaksanaan Katalog Elektronik, Toko Daring, atau E- purchasing	Direktorat Pasar Digital Pengadaan	LKPP-DAB- 02.04.05	
02.04	Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak melalui Surat, Tatap Muka dan Website (7)	Untuk memberikan jawaban yang berisi saran/pendap at/rekomenda si dan/atau tindakan koreksi	Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sangguh	LKPP-DAB- 02.04.05, LKPP-DAB- 02.04.06, LKPP-DAB- 02.04.07, LKPP-DAB- 03.01.01	RAL.01.28.01 Penyelenggaraan Peraturan dan Perundang- undangan
02.05	Pelayanan Pemberian Keterangan Ahli (8)	Memberikan penugasan Ahli untuk pemberian keterangan pada gelar kasus/perkara dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP) atau keterangan	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	LKPP-DAB- 02.04.05, LKPP-DAB- 03.01.01	RAL.01.28.04 Penyelenggaraan Peradilan

ID (LKPP-DAL)	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Kerja	Proses Bisnis Terkait	Referensi Arsitektur Layanan (RAL)
		dalam persidangan			
02.06	Pelayanan Konsultasi, Permohonan Informasi dan Keluhan Pelanggan Terkait Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Untuk memberikan informasi terkait Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Direktorat Sertifikasi Profesi	LKPP-DAB-02.04.05	RAL.02.06.09 Dukungan Teknis Operasional
02.07	Layanan Pemberian Konsultasi dan Pendampingan Pengadaan Khusus		Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus	LKPP-DAB-02.04.05	RAL.02.08.05 Bimbingan Teknis dan Supervisi
03	Diseminasi/ Sosialisasi /Pelatihan			LKPP-DAB-02.01.01, LKPP-DAB-02.04.01, LKPP-DAB-02.04.02, LKPP-DAB-02.05.01, LKPP-DAB-02.06.01, LKPP-DAB-02.03.05	RAL.01.28.01 Penyelenggaraan Peraturan dan Perundang-undangan
03.01	Layanan Diseminasi Perundang-undangan di	Untuk melaksanakan diseminasi secara luring/tatap	Direktorat Pengembangan Strategi dan	LKPP-DAB-02.01.01	RAL.01.28.01 Penyelenggaraan Peraturan dan Perundang-undangan

ID (LKPP- DAL)	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Kerja	Proses Bisnis Terkait	Referensi Arsitektur Layanan (RAL)
	bidang PBJ (09)	muka dan daring	Kebijakan Umum		
03.02	Pelayanan Pengembang an Kapasitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJP) (10)	Untuk memberikan informasi/kon sultasi/materi dan narasumber yang terkait dengan proses pengadaan Barang/ Jasa pemerintah kepada pelaku usaha	Direktorat Pengembang an Iklim Usaha dan Kerja sama Internasional	LKPP-DAB- 02.04	RAL.01.14.01 Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah
03.03	Pelayanan Sosialisasi/Bi mbingan Teknis Rencana Umum Pengadaan, Monitoring Evaluasi Pengadaan, dan Sanksi Daftar Hitam (11)	Untuk melaksanakan Sosialisasi/Bi mbingan Teknis Rencana Umum Pengadaan, Monitoring Evaluasi Pengadaan, dan Sanksi Daftar Hitam	Direktorat Perencanaan Transformasi , Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan	LKPP-DAB- 02.06.01	RAL.02.08.05 Bimbingan Teknis dan Supervisi
03.04	Pelayanan Sosialisasi/Bi mbingan Teknis Mengenai Katalog Elektronik dan Toko Daring (12)	Untuk melaksanakan Sosialisasi/Bi mbingan Teknis Mengenai Katalog Elektronik dan Toko Daring	Direktorat Pasar Digital Pengadaan	LKPP-DAB- 02.03.05	RAL.02.08.05 Bimbingan Teknis dan Supervisi

ID (LKPP-DAL)	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Kerja	Proses Bisnis Terkait	Referensi Arsitektur Layanan (RAL)
03.05	Pelayanan Permohonan Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai Sistem Pengadaan Secara Elektronik (13)	Untuk melaksanakan Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Direktorat Sistem Pengadaan Digital	LKPP-DAB-02.03.05	RAL.02.08.05 Bimbingan Teknis dan Supervisi
03.06	Pelayanan Bimbingan Teknis LPSE SPSE dan Bimbingan Teknis LPSE Admin System di LKPP (14)	Untuk melaksanakan Bimbingan Teknis LPSE SPSE dan Bimbingan Teknis LPSE Admin System di LKPP	Direktorat Sistem Pengadaan Digital	LKPP-DAB-02.03.05	RAL.02.08.05 Bimbingan Teknis dan Supervisi
03.07	Pelayanan Bimbingan Teknis Standarisasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) di LKPP (15)	Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis LPSE	Direktorat Sistem Pengadaan Digital	LKPP-DAB-02.03.05, LKPP-DAB-02.04.03	RAL.02.08.05 Bimbingan Teknis dan Supervisi
03.08	Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa Tingkat Dasar Blended Learning (16)	Terselenggaranya Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa Tingkat Dasar Blended Learning	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa	LKPP-DAB-02.05.01	RAL.02.08.05 Bimbingan Teknis dan Supervisi

ID (LKPP-DAL)	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Kerja	Proses Bisnis Terkait	Referensi Arsitektur Layanan (RAL)
03.09	Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Fasilitator PBJ Tingkat Dasar (17)	Terselenggaranya Pelatihan Bagi Fasilitator PBJ Tingkat Dasar	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa	LKPP-DAB-02.05.01	RAL.02.08.05 Bimbingan Teknis dan Supervisi
03.10	Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (18)	Terselenggaranya Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa di Desa	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa	LKPP-DAB-02.05.01	RAL.02.08.05 Bimbingan Teknis dan Supervisi
03.11	Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (19)	Terselenggaranya Pelatihan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa	LKPP-DAB-02.05.01	RAL.02.08.05 Bimbingan Teknis dan Supervisi
03.12	Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Pembangunan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/ Jasa (20)		Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa	LKPP-DAB-02.05.01	RAL.02.04.03 MANAJEMEN ASN
03.13	Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/ Jasa		Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa	LKPP-DAB-02.04.01, LKPP-DAB-02.04.02, LKPP-DAB-02.05.01	RAL.02.04.03 Manajemen ASN

ID (LKPP- DAL)	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Kerja	Proses Bisnis Terkait	Referensi Arsitektur Layanan (RAL)
	Pertama, Muda, dan Madya (21)				
03.14	Pelayanan Penyelenggara an Pelatihan Okupasi Pengguna Anggaran/Kua sa Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/ Jasa, Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen, Okupasi Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa, dan Okupasi Pejabat Pengadaan (22)		Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa	LKPP-DAB- 02.05.01	RAL.02.08.05 Bimbingan Teknis dan Supervisi
03.15	Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 (Model Pembelajaran Blended Learning)		Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa	LKPP-DAB- 02.05.01	RAL.02.08.05 Bimbingan Teknis dan Supervisi

ID (LKPP-DAL)	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Kerja	Proses Bisnis Terkait	Referensi Arsitektur Layanan (RAL)
03.16	Pelayanan sosialisasi sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah		Direktorat Sertifikasi Profesi	LKPP-DAB-02.05.03	RAL.01.32.01.02 Standar Kompetensi Kerja
03.17	Layanan Serap Aspirasi atau Uji Publik Rancangan Kebijakan PBJP		Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum	LKPP-DAB-02.01.01	RAL.01.03.02 Penyerapan Aspirasi Masyarakat
04	Dukungan Aplikasi pengadaan			LKPP-DAB-02.03.05, LKPP-DAB-02.05.02	RAL.02.06.09 Dukungan Teknis Operasional
04.01	Pelayanan Dukungan Penggunaan SPSE melalui LPSE Support, Tatap Muka dan Call center (23)		Direktorat Sistem Pengadaan Digital	LKPP-DAB-02.03.05, LKPP-DAB-02.05.02	RAL.02.06.09 Dukungan Teknis Operasional
05	Pengembangan Profesi dan Kelembagaan PBJ			LKPP-DAB-02.04.01	
05.01	Pelayanan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa oleh Tim		Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	LKPP-DAB-02.04.01	RAL.02.06.14 Koordinasi Pengembangan Kapasitas

ID (LKPP- DAL)	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Kerja	Proses Bisnis Terkait	Referensi Arsitektur Layanan (RAL)
	Penilai Pusat atau Tim Penilai LKPP (Untuk tahun 2023, akan menggunakan SKP sebagai bahan penilaian kinerja individu)(24)				
05.02	Pelayanan Verifikasi Penilaian Mandiri Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (25)		Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	LKPP-DAB-02.04.03	RAL.02.04.03 Manajemen ASN
05.03	Pelayanan Permohonan Pembinaan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (26)		Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	LKPP-DAB-02.03.01, LKPP-DAB-02.04.03	RAL.02.06.14 Koordinasi Pengembangan Kapasitas
05.04	Layanan pembentukan JF PPBJ melalui Perpindahan dari Jabatan Lain		Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	LKPP-DAB-02.03.02	RAL.02.04.03 Manajemen ASN

ID (LKPP- DAL)	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Kerja	Proses Bisnis Terkait	Referensi Arsitektur Layanan (RAL)
05.05	Layanan penyusunan dan pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ		Direktorat Pengembang an Profesi dan Kelembagaan	LKPP-DAB-02.03.02	RAL.02.03.03 Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek
05.06	Layanan pembentukan UKPBJ		Direktorat Pengembang an Profesi dan Kelembagaan	LKPP-DAB-02.03.02	RAL.01.16.02 Akreditasi Lembaga Sertifikasi
05.07	Layanan pembinaan JF PPBJ		Direktorat Pengembang an Profesi dan Kelembagaan	LKPP-DAB-02.03.02	RAL.02.04.03 Manajemen ASN
05.08	Layanan Pembinaan Kepala UKPBJ		Direktorat Pengembang an Profesi dan Kelembagaan	LKPP-DAB-02.04.02	RAL.02.04.03 Manajemen ASN
05.09	Layanan peningkatan kapabilitas UKPBJ		Direktorat Pengembang an Profesi dan Kelembagaan	LKPP-DAB-02.04.03	RAL.02.06.14 Koordinasi Pengembangan Kapasitas
05.10	Layanan pembentukan JF PPBJ		Direktorat Pengembang an Profesi dan Kelembagaan	LKPP-DAB-02.03.02	RAL.01.16.02 Akreditasi Lembaga Sertifikasi
05.11	Layanan permohonan rekomendasi kebutuhan JF PPBJ		Direktorat Pengembang an Profesi dan Kelembagaan	LKPP-DAB-02.03.02	RAL.02.04.03 Manajemen ASN

ID (LKPP-DAL)	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Kerja	Proses Bisnis Terkait	Referensi Arsitektur Layanan (RAL)
05.12	Layanan pemantauan dan evaluasi kamus kompetensi teknis dan standar kompetensi PBJ		Direktorat Pengembang an Profesi dan Kelembagaan	LKPP-DAB-02.06.01	RAL.02.06.14 Koordinasi Pengembangan Kapasitas
06	Akreditasi dan Sertifikasi				
06.01	Pelayanan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa (LPPBJ) (27)		Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa	LKPP-DAB-02.03.03, LKPP-DAB-02.04.04	RAL.01.16.02 Akreditasi Lembaga Sertifikasi
06.02	Pelayanan Sertifikasi Dasar Barang/ Jasa Pemerintah (28)		Direktorat Sertifikasi Profesi	LKPP-DAB-02.05.03	RAL.01.32.01 Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja Serta Produktivitas
06.03	Pelayanan Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa (29)		Direktorat Sertifikasi Profesi	LKPP-DAB-02.03.02, LKPP-DAB-02.05.03	RAL.02.06.14 Koordinasi Pengembangan Kapasitas
06.04	Pelayanan cetak ulang sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah		Direktorat Sertifikasi Profesi	LKPP-DAB-02.03.03	RAL.02.06.14 Koordinasi Pengembangan Kapasitas

ID (LKPP- DAL)	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Kerja	Proses Bisnis Terkait	Referensi Arsitektur Layanan (RAL)
06.05	Pelayanan pembentukan pelaksana uji kompetensi		Direktorat Sertifikasi Profesi	LKPP-DAB-02.04.02	RAL.02.06.14 Koordinasi Pengembangan Kapasitas
06.06	Pelayanan Sertifikasi Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah		Direktorat Sertifikasi Profesi	LKPP-DAB-02.05.03	RAL.02.06.14 Koordinasi Pengembangan Kapasitas
06.07	Pelayanan pemutakhiran data sertifikasi		Direktorat Sertifikasi Profesi	LKPP-DAB-02.05.03	RAL.01.16.02 Akreditasi Lembaga Sertifikasi
07	Pengaduan Pelayanan Publik		Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	LKPP-DAB-01.04	RAL.01.28.06 Penegakan Hukum
08	Data Terbuka	Menghasilkan pengelolaan data terbuka Instansi yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum		
09	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Menghasilkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia		
10	Layanan Perencanaan	Menghasilkan pengelolaan perencanaan	Biro Perencanaan		

ID (LKPP- DAL)	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Kerja	Proses Bisnis Terkait	Referensi Arsitektur Layanan (RAL)
		yang efektif, efisien, dan akuntabel	dan Keuangan		
11	Layanan Penganggaran	Menghasilkan pengelolaan penganggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel	Biro Perencanaan dan Keuangan		
12	Layanan Keuangan	Menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Biro Perencanaan dan Keuangan		
13	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Menghasilkan pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum		
14	Layanan Kepegawaian	Menghasilkan pengelolaan Kepegawaian yang efektif, efisien, dan akuntabel	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia		
15	Layanan Kearsipan Dinamis	Menghasilkan pengelolaan kearsipan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum		
16	Layanan Pengelolaan	Menghasilkan pengelolaan BMN yang	Biro Hubungan		

ID (LKPP-DAL)	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Kerja	Proses Bisnis Terkait	Referensi Arsitektur Layanan (RAL)
	Barang Milik Negara	efektif, efisien, dan akuntabel.	Masyarakat dan Umum		
17	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	Menghasilkan pengelolaan pengawasan internal yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Inspektorat		
18	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Menghasilkan pengelolaan Akuntabilitas yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia		
19	Layanan Kinerja Pegawai	Menghasilkan pengelolaan Kinerja Pegawai yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia		

4. Analisis Gap Arsitektur Layanan

Analisis gap didasarkan pada perbedaan target kondisi ideal yang ingin dicapai dan kondisi saat ini. Analisis Gap Arsitektur layanan dapat dilihat pada Tabel III.5.

Tabel III.5 Analisis Gap Arsitektur Layanan

Area	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	Gap	Rencana Aksi
Daftar Layanan dan Sub Layanan	Daftar layanan publik sektoral ditambah layanan administrasi	Daftar layanan dan sub-layanan administrasi pemerintahan,	Daftar layanan administrasi pemerintahan dan publik umum belum	Mengadakan workshop untuk melengkapi daftar

	pemerintahan dan layanan publik umum	publik umum dan sektoral	diuraikan lebih rinci	layanan dan sublayanan secara rinci
Pemetaan Layanan-Probis	Layanan-Proses Bisnis belum dipetakan semua	Layanan merupakan keluaran dari satu atau lebih proses bisnis, oleh karena itu, setiap layanan/sublayanan dipetakan ke Proses Bisnis terkait	Ada beberapa layanan yang belum dapat dipetakan karena proses bisnis belum lengkap, terutama untuk Proses Pengarah	Mengadakan workshop untuk memetakan layanan dengan proses bisnis
Akses Layanan	Sebagian besar layanan masih dilakukan secara semi online (via e-mail)	Layanan berbasis elektronik didukung oleh sistem aplikasi berbagi pakai atau khusus	Sebagian layanan masih belum memiliki akses secara online	Akses layanan dengan menggunakan sistem online

B. Arsitektur Proses Bisnis

Pada domain arsitektur proses bisnis dilakukan klasifikasi jenis tugas dan fungsi pemerintahan dari LKPP agar dapat menggambarkan potensi kolaborasi LKPP dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta pengintegrasian secara terpadu di setiap elemen pemerintahan dalam melakukan tugas dan fungsi yang diemban. Klasifikasi proses bisnis, dilakukan secara umum dan tidak terikat dengan organisasi yang ada, maka diharapkan dapat mengakomodasi setiap fungsi organisasi yang ada pada LKPP, serta para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintahan dari LKPP, dengan tidak membedakan organisasi yang mengemban urusan pemerintahan tertentu.

Hal ini bertujuan agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada LKPP dapat mendorong pencapaian tujuan pemerintah dalam menyediakan layanan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas administrasi pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel serta mengurangi pemborosan anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi yang diakibatkan karena adanya duplikasi pembelanjaan, serta membantu memberikan analisis yang obyektif dalam penyederhanaan birokrasi yang menjadi prioritas agenda pembangunan. Penyusunan arsitektur Proses Bisnis

mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Kerangka kerja arsitektur proses bisnis terdiri atas referensi arsitektur proses bisnis dan domain arsitektur proses bisnis.

Domain Arsitektur Proses Bisnis LKPP disusun berdasarkan dokumen terkait proses bisnis yang telah dimiliki. LKPP sudah memiliki Peta Proses Bisnis yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Nomor 98 Tahun 2021 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan turunan dari proses bisnis.

Peta Proses Bisnis LKPP ini terdiri atas:

1) Peta Proses Bisnis Level 0 (*Value Chain*)

a. Proses Pengarah terdiri dari Manajemen Strategi

- i. Tata Kelola
- ii. Manajemen Risiko
- iii. Pengendalian Internal.

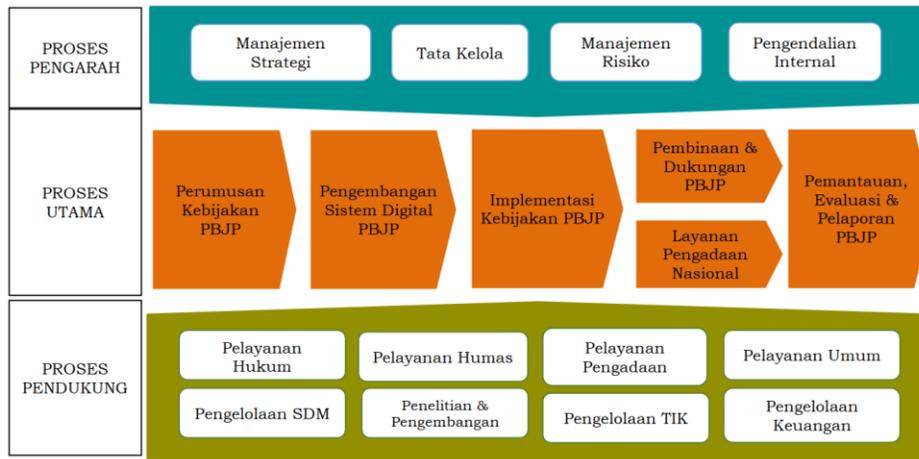
b. Proses Utama

- i. Perumusan Kebijakan PBJP
- ii. Pengembangan Sistem Digital PBJP
- iii. Implementasi Kebijakan PBJP
- iv. Pembinaan & Dukungan PBJP
- v. Layanan Pengadaan Nasional
- vi. Pemantauan, Evaluasi & Pelaporan PBJP.

c. Proses Pendukung

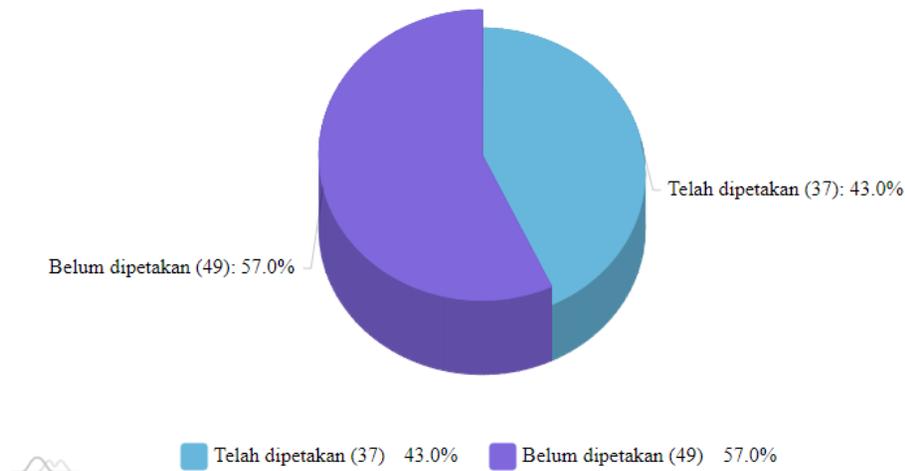
- i. Pelayanan Hukum
- ii. Pelayanan Humas
- iii. Pelayanan Pengadaan
- iv. Pelayanan Umum
- v. Pengelolaan SDM
- vi. Penelitian & Pengembangan
- vii. Pengelolaan TIK
- viii. Pengelolaan Keuangan.

2) Peta Proses Bisnis Level 1, yang merupakan turunan dari Proses Bisnis Level 0 menjelaskan masing-masing proses dalam Proses Pengarah, Proses Utama, dan Proses Pendukung (Gambar III.3).



Gambar III.3 Proses Bisnis LKPP – Level 0

Peta Proses Bisnis ini menjadi acuan penyesuaian dan penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) LKPP yang merupakan turunan dari Proses Bisnis. Akan tetapi dengan adanya perubahan SOTK pada LKPP, maka terjadi perubahan, terutama pemetaan antara Proses Bisnis dan SOP, berdasarkan SOTK tahun 2023. Komposisi pemetaan dapat dilihat pada Gambar III.4.

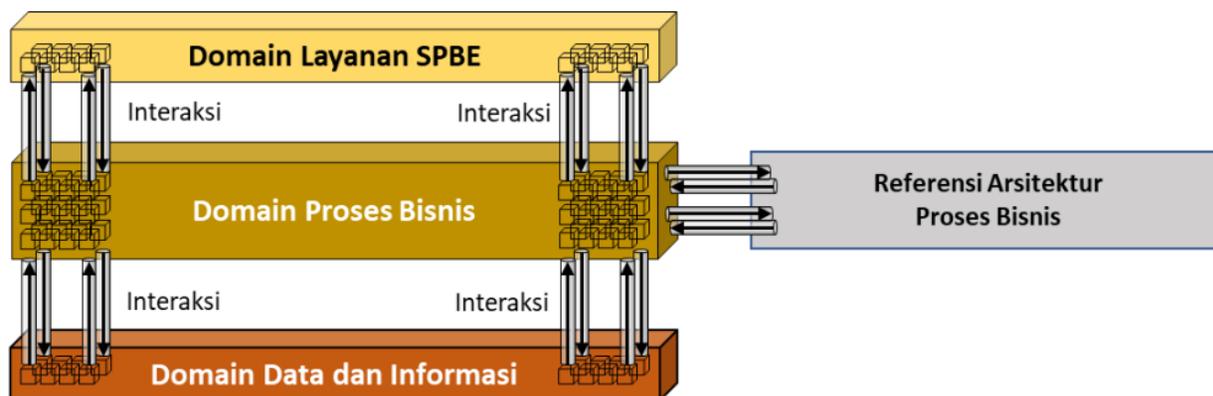


Gambar III.4 Pemetaan Proses Bisnis - SOP

1. Arsitektur Proses Bisnis Eksisting

Domain arsitektur proses bisnis ini terdiri dari berbagai macam proses bisnis pemerintahan yang akan menghasilkan berbagai macam data dan informasi, serta akan mendefinisikan layanan pemerintah, sebagaimana terlihat ilustrasi keterkaitan pada Gambar III.5, di mana domain proses bisnis akan berelasi langsung dengan domain layanan SPBE dan domain data dan informasi. Dengan adanya keterkaitan antar domain arsitektur lainnya dalam SPBE, maka dapat direlasikan informasi-informasi lainnya terkait urusan pemerintahan yang dilakukan, sebagai contoh melihat layanan-layanan yang dihasilkan dalam urusan pemerintahan tersebut, atau aplikasi dan infrastruktur apa saja yang

mendukung, atau data dan informasi apa yang diperlukan atau dihasilkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.



Gambar III.5 Relasi Langsung Domain Proses Bisnis

Relasi langsung Arsitektur proses bisnis dapat dilihat pada Gambar III.5, Relasi langsung domain proses bisnis dengan domain layanan dan domain data dan informasi, tidak diperlihatkan pada tabel ini, akan tetapi dipetakan relasi langsungnya pada arsitektur layanan dan data informasi. Arsitektur Proses Bisnis Eksisting dapat dilihat pada Tabel III.6

Tabel III.6 Arsitektur Proses Bisnis Eksisting

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
01	Proses Pengarah			RAB.09.05.02 .01 Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah	
01.01	Manajemen Strategi	Proses pengelolaan strategi mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi dan monitoring strategi, termasuk manajemen kinerja unit.	RENSTRA, RENJA, dan RKA	RAB.09.05.02 .01 Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah	Biro Perencanaan dan Keuangan
01.01.01	Analisis Strategis -			RAB.09.05.02 .01 Penyusunan	Biro Perencanaan

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
	Formulasi Strategi			Perencanaan Jangka Menengah	n dan Keuangan
01.01.02	Strategi Cascading- Implementasi Strategi			RAB.09.05.02 .01 Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah	Biro Perencanaa n dan Keuangan
01.01.03	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan			RAB.09.05.02 .01 Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah	Biro Perencanaa n dan Keuangan
01.02	Tata Kelola	Pengelolaan proses kerja yang ada di LKPP, termasuk pengembangan berkesinambunga n dari proses- proses yang ada	Proses Bisnis, Dokumen Pedoman kerja antara lain SOP dan Instruksi Kerja	RAB.09.05.02 .01 Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah	
01.02.01	Identifikasi Kebutuhan Proses Bisnis dan Pedoman Kerja			RAB.09.05.02 .01 Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah	
01.02.02	Penyusunan Proses Bisnis dan Pedoman Kerja			RAB.09.05.02 .01 Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah	
01.02.03	Sosialisasi/ Diseminasi			RAB.09.05.02 .01 Penyusunan	

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
				Perencanaan Jangka Menengah	
01.02.04	Implementasi			RAB.09.05.02 .01 Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah	
01.02.05	Pemantauan dan Evaluasi			RAB.09.05.02 .01 Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah	
01.02.06	Perbaikan			RAB.09.05.02 .01 Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah	
01.02.07	Pelaporan			RAB.09.05.02 .01 Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah	
01.03	Manajemen Resiko	Proses pengelolaan risiko dalam organisasi LKPP, mulai dari identifikasi, mitigasi dan monitoring risiko	Profil Risiko, Kegiatan Mitigasi, dan Peta Risiko	RAB.09.05.02 .01 Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah	
01.03.01	Identifikasi Konteks Manajemen Risiko			RAB.09.05.02 .01 Penyusunan Perencanaan	

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
				Jangka Menengah	
01.03.02	Identifikasi Risiko			RAB.09.05.02 .01 Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah	
01.03.03	Analisis Risiko			RAB.09.05.02 .01 Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah	
01.03.04	Evaluasi Risiko			RAB.09.05.02 .01 Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah	
01.03.05	Respon Risiko			RAB.09.05.02 .01 Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah	
01.03.06	Pemantauan dan Reviu			RAB.09.05.02 .01 Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah	
01.03.07	Komunikasi dan Konsultasi			RAB.09.05.02 .01 Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah	

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
01.03.08	Pelaporan			RAB.09.05.02 .01 Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah	
01.04	Pengawasan Intern	Proses yang mengendalikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di internal LKPP untuk memastikan kepatuhan (compliance) dan Good Governance.	Indeks Kepatuhan		Inspektorat
01.04.01	Perencanaan				Inspektorat
01.04..02	Pelaksanaan				Inspektorat
01.04.03	Pelaporan				Inspektorat
01.04.04	Tindak Lanjut				Inspektorat
02	Proses Utama				
02.01	Perumusan kebijakan PBJP	Merupakan fungsi utama LKPP dalam perumusan dan penetapan Kebijakan pengadaan barang/ jasa Pemerintah, yang akan menjadi rujukan bagi Instansi Pemerintah dan/atau pihak lain dalam melakukan kegiatan	Kebijakan PBJP yang telah disosialisasikan		

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
		<p>Pengadaan barang/ jasa Pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - pengadaan barang/ jasa Pemerintah - pengembangan dan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia PBJP - pengembangan dan pembinaan digitsd PBJP - pemantauan, evaluasi dan pelaporan • Kebijakan dapat berupa Surat Edaran, Keputusan Deputi, Keputusan Kepala LKPP, Peraturan Kepala LKPP, Peraturan Presiden, atau peraturan lainnya. 			
02.01.01	Agenda Setting				
02.01.02	Penyusunan Kebijakan				
02.01.03	Penetapan Kebijakan				
02.01.04	Pelaporan				

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
02.01.05	Diseminasi Kebijakan				
02.02	Pengembangan Sistem Digital PBJP	Melakukan pengembangan sistem pengadaan barang/ jasa Pemerintah secara elektronik (Digital) dalam rangka Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Pengembangan digital termasuk penggunaan teknologi terbaru sesuai dengan perkembangan teknologi dan arahan kebijakan LKPP. Sistem digital mencakup aplikasi [software), infrastruktur, jaringan (network), database, dan sistem keamanannya	Sistem/ aplikasi basil pengembangan yang siap digunakan	RAB.06.03.09 .02 Inovasi Teknologi	
02.02.01	Identifikasi Kebutuhan			RAB.06.03.09 .02 Inovasi Teknologi	
02.02.02	Perencanaan Sistem			RAB.06.03.09 .02 Inovasi Teknologi	

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
02.02.03	Pengembangan Sistem			RAB.06.03.09 .02 Inovasi Teknologi	
02.02.04	System Testing			RAB.06.03.09 .02 Inovasi Teknologi	
02.02.05	System Deployment			RAB.06.03.09 .02 Inovasi Teknologi	
02.02.06	Pelaporan			RAB.06.03.09 .02 Inovasi Teknologi	
02.03	Implementasi kebijakan PBJP	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan proses implementasi dari kebijakan terkait pengadaan barang/ jasa Pemerintah yang membutuhkan peran serta LKPP sebagai pendorong implementasi [drive]. Dalam hal ini, LKPP akan bekeaja sama dengan Instansi terkait untuk memastikan implementasi berjalan dengan baik. • Kegiatan implementasi antara lain : Pembentukan UKPBJ, 	Penerapan Kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa Pemerintah di K/L/PD yang salah satunya adalah Indeks Tata Kelola Pengadaan.		

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
		Pembentukan JF PPBJ, Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa, Penerapan SPSE, Pembentukan Clearing House, dan Pembentukan Pemberian Keterangan Ahli.			
02.03.01	Perencanaan (02.03.01)				
02.03.02	Koordinasi (02.03.02)			RAB.09.06.03 .01 Sistem Kelembagaan	
02.03.03	Persiapan (02.03.03)				
02.03.04.	Pelaksanaan (02.03.04)				
02.03.05	Pelaporan (02.03.05)				
02.04	Pembinaan dan Dukungan PBJP	<ul style="list-style-type: none"> • Adalah kegiatan pembinaan dalam hal kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem digital di bidang Pengadaan barang/ jasa Pemerintah • Kegiatan pembinaan antara lain adalah: <ul style="list-style-type: none"> - sosialisasi/bimtek 	Peningkatan kapasitas Instansi Pemerintah; Layanan terkait pengembangan kompetensi SDM PBJ & Pelaku Usaha; dan Indeks Kepuasan K/L/PD atas layanan LKPP		

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
		<p>- reward & punishment</p> <p>- pengawasan penyelenggaraan sistem pengadaan secara elektronik</p> <p>- pengelolaan maturitas UKPBJ {survailans, penilaian, pemeringkatan, reward & punishment</p> <p>- peringkat Lembaga Pelatihan PBJ, dan SDM PBJ lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • LKPP memberikan dukungan di bidang pengadaan barang/ jasa Pemerintah kepada stakeholder terkait, antara lain dalam bentuk konsultasi baik pengaduan maupun diluar pengaduan, advokasi, pendampingan, Layanan Penyelesaian Sengketa. Dukungan dapat 			

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
		dilakukan melalui berbagai media.			
02.04.01	Peningkatan Kapabilitas UKPBJ				
02.04.01.01	Identifikasi Kebutuhan				
02.04.01.02	Persiapan				
02.04.01.03	Pelaksanaan				
02.04.01.04	Pelaporan				
02.04.02	Peningkatan Kapabilitas LPPBJ				
02.04.02.01	Identifikasi Kebutuhan				
02.04.02.02	Persiapan				
02.04.02.03	Pelaksanaan				
02.04.02.04	Pelaporan				
02.04.03	Knowledge Management				
02.04.03.01	Identifikasi Kebutuhan				
02.04.03.02	Persiapan				
02.04.03.03	Pelaksanaan				
02.04.03.04	Pelaporan				
02.04.04	Pembinaan SDM PBJ: A. Pembinaan JF PPBJ				
02.04.04.01	Identifikasi Kebutuhan				
02.04.04.02	Persiapan				
02.04.04.03	Pelaksanaan				
02.04.04.04	Pelaporan				
02.04.05	Pembinaan SDM PBJ: B. Pembinaan Kepala UKPBJ				

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
02.04.05.01	Identifikasi Kebutuhan				
02.04.05.02	Persiapan				
02.04.05.03	Pelaksanaan				
02.04.05.04	Pelaporan				
02.04.06	Pembentukan Clearing House				
02.04.06.01	Identifikasi Kebutuhan				
02.04.06.02	Persiapan				
02.04.06.03	Pelaksanaan				
02.04.06.04	Pelaporan				
02.04.07	Konsultasi/ Advokasi/ Pendampingan				
02.04.07.01	Identifikasi Kebutuhan				
02.04.07.02	Persiapan				
02.04.07.03	Pelaksanaan				
02.04.07.04	Pelaporan				
02.04.08	Penyelesaian Sengketa Kontrak				
02.04.08.01	Identifikasi Kebutuhan				
02.04.08.02	Persiapan				
02.04.08.03	Pelaksanaan				
02.04.08.04	Pelaporan				
02.05	Layanan Pengadaan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Selain sebagai lembaga penjmsun kebijakan, LKPP juga menyediakan beberapa layanan dalam bidang Pengadaan barang/ jasa Nasional untuk 	Terpenuhinya permintaan Instansi lainnya baik dalam bentuk pengadaan barang/ jasa, penayangan katalog/toko daring, dan		

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
		Instansi lain. Kegiatan layanan tersebut antara lain: - Pengelolaan Katalog Elektronik Nasional/toko daring - Pengadaan barang/ jasa Pemerintah untuk Instansi lain - Pelatihan dan sertifikasi SDM PBJ oleh LKPP • Proses Layanan PBJP ini dapat dihilangkan dari Proses Bisnis Level 0 LKPP jika sudah tidak dilakukan lagi.	pelatihan terkait PBJP		
02.05.01	Pengelolaan Katalog				
02.05.01.01	Permintaan Layanan				
02.05.01.02	Analisis Kebutuhan				
02.05.01.03	Persiapan				
02.05.01.04	Pelaksanaan				
02.05.01.05	Pelaporan				
02.05.02	Pelatihan Sumber Daya Manusia PBJ				
02.05.02.01	Permintaan Layanan				

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
02.05.02.02	Analisis Kebutuhan				
02.05.02.03	Persiapan				
02.05.02.04	Pelaksanaan				
02.05.02.05	Pelaporan				
02.05.03	Sertifikasi Sumber Daya Manusia PBJ				
02.05.03.01	Permintaan Layanan				
02.05.03.02	Analisis Kebutuhan				
02.05.03.03	Persiapan				
02.05.03.04	Pelaksanaan				
02.05.03.05	Pelaporan				
02.06	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan PBJP	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan LKPP untuk memastikan implementasi dari kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa Pemerintah telah dilaksanakan dengan baik. • LKPP juga melakukan proses evaluasi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa Pemerintah. Hasil 	Laporan agregat terkait PBJP dan kualitas kebijakan		

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
		evaluasi akan menjadi masukan dalam proses Perumusan Kebijakan maupun Pengembangan Sistem Digital. • Proses pelaporan adalah kegiatan penyusunan laporan dan penyediaan informasi di bidang pengadaan barang/ jasa Pemerintah, termasuk pengkomunikasia nnya kepada pemangku kepentingan seperti Presiden, Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan masyarakat.			
02.06.01	Perencanaan				
02.06.02	Pemantauan PBJP				
02.06.03	Evaluasi PBJP				
02.06.04	Pelaporan				
03	Proses Pendukung				

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
03.01	Pelayanan Hukum	Proses layanan dalam hal kebutuhan legal dan hukum internal LKPP	Proses layanan dalam hal kebutuhan legal dan hukum internal LKPP		
03.01.01	Identifikasi Kebutuhan				
03.01.02	Pengkajian				
03.01.03	Legal Drafting				
03.01.04	Legal Opini/Advice				
03.01.05	Pelaksanaan Pendampingan Hukum				
03.01.06	Penyelesaian Sengketa (Kuasa Hukum)				
03.01.07	Pelaporan				
03.02	Pelayanan Humas	Proses Layanan Hubungan Masyarakat, mencakup antara lain layanan publikasi, layanan dokumentasi, dan layanan informasi			
03.02.01	Peliputan				BHU
03.02.01.01	Perencanaan Kegiatan Humas				BHU
03.02.01.02	Persiapan Kegiatan				BHU
03.02.01.03	Pelaksanaan Kegiatan	Proses layanan kegiatan pengadaan di internal LKPP	Hasil pengadaan		

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
03.02.01.04	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan				
03.02.02	Kerjasama				
03.02.02.01	Perencanaan Kegiatan Kehumasan				
03.02.02.02	Persiapan Kegiatan				BHU
03.02.02.03	Pelaksanaan Kegiatan				BHU
03.02.02.04	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan				BHU
03.02.03	Publikasi				BHU
03.02.03.01	Perencanaan Kegiatan Kehumasan				BHU
03.02.03.02	Persiapan Kegiatan				BHU
03.02.03.03	Pelaksanaan Kegiatan				
03.02.03.04	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan			RAB.09.06.03 .01 Sistem Kelembagaan	
03.03	Pelayanan Pengadaan				
03.03.01	Pengadaan Melalui Penyedia				
03.03.01.01	Perencanaan Pengadaan				
03.03.01.02	Persiapan Pengadaan				
03.03.01.03	Persiapan Pemilihan				
03.03.01.04	Pelaksanaan Pemilihan				

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
03.03.01.05	Pelaksanaan Kontrak				
03.03.01.06	Penyerahan Hasil				
03.03.01.07	Penilaian dan Pelaporan				
03.03.02	Pengadaan Melalui Swakelola				
03.03.02.01	Perencanaan Pengadaan				
03.03.02.02	Persiapan Pengadaan				
03.03.02.03	Pelaksanaan Kontrak				
03.03.02.04	Penyerahan Hasil				
03.03.02.05	Penilaian dan Pelaporan				
03.04	Pelayanan Umum	Proses layanan umum terdiri dari proses pengelolaan BMN (aset LKPP); proses layanan tata usaha (buku, dokumen naskah dinas, dan arsip); serta proses layanan keprotokolan/ pimpinan)	Beragam tergantung dari masing-masing proses turunannya		
03.04.01	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)				
03.04.01.01	Perencanaan				
03.04.01.02	Pengadaan				

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
03.04.01.03	Penatausahaan BMN				
03.04.01.04	Penggunaan dan Pemanfaatan				
03.04.01.05	Pengamanan dan Pemeliharaan				
03.04.01.06	Penghapusan				
03.04.01.07	Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan				
03.04.02	Layanan Tata Usaha (Buku, Dokumen Naskah Dinas dan Arsip)				
03.04.02.01	Layanan Tata Usaha: Buku dan Perpustakaan	Layanan buku pada perpustakaan	laporan keperustakaan		
03.04.02.01. 01	Penerimaan Dokumen				
03.04.02.01. 02	Registrasi				
03.04.02.01. 03	Distribusi dan/atau Penyimpanan				
03.04.02.01. 04	Penggunaan				
03.04.02.01. 05	Pelaporan				
03.04.02.02	Layanan Tata Usaha: Dokumen Naskah Dinas	Layanan dokumen naskah dinas (surat masuk sampai surat keluar, laporan, surat	laporan persuratan		

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
		tugas, surat keputusan, dan semua dokumen yang masuk dalam peraturan Tata Naskah Dinas)			
03.04.02.02. 01	Penerimaan Dokumen				
03.04.02.02. 02	Registrasi				
03.04.02.02. 03	Distribusi dan/atau Penyimpanan				
03.04.02.02. 04	Penggunaan				
03.04.02.02. 05	Pelaporan				
03.04.02.03	Layanan Tata Usaha: Arsip	Layanan arsip, baik arsip digital maupun non-digital	laporan pengarsipan		
03.04.02.03. 01	Penerimaan Dokumen				
03.04.02.03. 02	Registrasi				
03.04.02.03. 03	Distribusi dan/atau Penyimpanan				
03.04.02.03. 04	Penggunaan				
03.04.02.03. 05	Pelaporan				
03.04.03	Layanan Keprotokolan dan Layanan Kepemimpinan				

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
03.05.03.01	Layanan Keprotokolan dan Layanan Kepemimpinan: Layanan Keprotokolan	Proses layanan keprotokolan menggambarkan proses untuk melayani Pimpinan dalam hal keprotokolan sesuai dengan regulasi terkait keprotokolan			
03.05.03.01. 01	Pengagendaan				
03.05.03.01. 02	Persiapan				
03.05.03.01. 03	Pelaksanaan				
03.05.03.01. 04	Pelaporan				
03.05.03.02	Layanan Keprotokolan dan Layanan Kepemimpinan: Layanan Pimpinan	Proses Layanan Pimpinan dengan melayani pimpinan baik pimpinan Lembaga, Eselon I dan II dalam hal pengurusan dokumen kepentingan dinas pimpinan	Pengurusan dokumen untuk kepentingan dinas Pimpinan		
03.05.03.02. 01	Pengagendaan				
03.05.03.02. 02	Persiapan				
03.05.03.02. 03	Pelaksanaan				
03.05.03.02. 04	Pelaporan				

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
03.06	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Proses pengelolaan SDM yang mencakup proses rekrutmen, budaya organisasi, struktur organisasi, pelatihan dan pengembangan, karir, dan remunerasi	Implementasi sistem merit		
03.06.01	Desain Organisasi				
03.06.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pemenuhan Pegawai, Pengadaan Pegawai dan Administrasi Pegawai				
03.06.02.01	Perencanaan Kebutuhan dan Pemenuhan Pegawai, Pengadaan Pegawai dan Administrasi Pegawai				
03.06.02.02	Pengadaan Pegawai				
03.06.02.03	Administrasi Pegawai				
03.06.03	Pengembangan Kompetensi dan				

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
	Pengelolaan Kinerja				
03.06.03.01	Pengembangan Kompetensi				
03.06.03.02	Pengelolaan Kinerja				
03.06.04	Pengembangan Karir dan Pengelolaan Penggajian				
03.06.04.01	Pengembangan Karir				
03.06.04.02	Pengelolaan Penggajian				
03.06.05	Pengelolaan Penghargaan dan Pemberhentian				
03.06.05.01	Pengelolaan Penghargaan				
03.06.05.02	Pemberhentian				
03.07	Pengkajian dan Pembangunan				
03.07.01	Identifikasi Kebutuhan dan Penetapan Topik				
03.07.02	Perencanaan dan Persiapan				
03.07.03	Pelaksanaan Pengkajian/Pe mbangunan				
03.07.04	Ujicoba				
03.07.05	Pelaporan dan Rekomendasi				
03.08	Pengelolaan Teknologi			RAB.09.06.03 .03	

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
	Informasi dan Komunikasi			Penerapan SPBE	
03.08.01	Pengelolaan Sistem dan Infrastruktur				
03.08.01.01	Desain Arsitektur dan Keamanan TIK				
03.08.01.02	Desain Sistem				
03.08.01.03	Pengembangan Aplikasi				
03.08.01.04	Instalasi dan Konfigurasi Infrastruktur				
03.08.01.05	Testing				
03.08.01.06	Implementasi				
03.08.01.07	Pemeliharaan dan Dukungan TIK				
03.08.01.08	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan				
03.08.02	Pengelolaan Data dan Informasi			RAB.09.06.03 .03 Penerapan SPBE	
03.08.02.01	Desain Arsitektur Data dan Informasi				
03.08.02.02	Pengumpulan dan Penyimpanan Data dan Informasi				
03.08.02.03	Pengolahan Data dan Informasi				

ID (LKPP-DAB)	Nama Bisnis/ Urusan	Uraian Bisnis	Sasaran Strategis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	Instansi
03.08.02.04	Analisis Data dan Informasi				
03.08.02.05	Penyajian dan Pelaporan Data dan Informasi				
03.09	Pengelolaan Keuangan	Proses pengelolaan keuangan organisasi	Laporan keuangan		
03.09.01	Perencanaan				
03.09.02	Pelaksanaan				
03.09.03	Pengujian				
03.09.04	Pembayaran				
03.09.05	Penjaminan Mutu				
03.09.06	Pelaporan				

2. Analisis Gap Arsitektur Proses Bisnis

Berdasarkan target SPBE yang ingin dicapai, kondisi eksisting dan kondisi ideal arsitektur proses bisnis, analisis gap dapat dilihat pada Tabel III.7.

Tabel III.7 Analisis Gap Arsitektur Proses Bisnis

Area	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	Gap	Rencana Tindakan
Model proses bisnis	Terdapat proses bisnis, tetapi belum sepenuhnya mengadopsi penyusunan peta proses bisnis berdasarkan Permenpan 19/2018	Penyusunan peta proses bisnis menggunakan level/tingkatan (BPMN) atau jenis gambar	Belum sepenuhnya adopsi penyusunan proses bisnis berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda	Mengadakan workshop untuk mengadopsi penyusunan proses bisnis sesuai Permenpan 19/2018

Area	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	Gap	Rencana Tindakan
Keselarasan dokumentasi dan aktual proses bisnis	Terdapat dokumentai proses bisnis, akan tetapi terdapat kesenjangan antara dokumentasi dengan proses bisnis aktualnya	Dokumen proses bisnis selaras dengan proses bisnis aktualnya	Ketidak-selarasan antara dokumen dan proses bisnis aktual berpotensi menimbulkan interpretasi yang tidak konsisten dan akan menyulitkan dalam melakukan inovasi proses bisnis	Mengadakan workshop untuk menyelaraskan antara dokumen dan proses bisnis aktualnya
Deskripsi proses	Terdapat proses bisnis, akan tetapi setiap aktivitas/proses belum dideskripsikan secara rinci	Setiap aktivitas/ proses dideskripsikan secara rinci	Belum rincinya deskripsi tiap aktivitas/proses, berpotensi menimbulkan kesulitan dalam melakukan inovasi proses bisnis	Mengadakan workhop untuk mendeskripsikan setiap aktivitas/proses dalam proses bisnis secara rinci
Relasi Proses Bisnis dengan Domain Layanan dan Domain Data dan Informasi	Baru Sebagian Pemetaan relasi dengan Domain Layanan dan Data dan Informasi	Relasi lengkap antara Domain Proses Bisnis dengan Domain Layanan dan Data dan Informasi	Ada beberapa layanan yang belum dapat dipetakan karena proses bisnis Belum lengkap	Mengadakan workshop untuk melengkapi relasi antara Domain Proses Bisnis dengan Domain Layanan dan Data dan Informasi
Penyesuaian Probis dengan SOTK	Pemetaan proses bisnis – SOTK masih	Pemetaan proses bisnis- SOTK sesuai	Belum terpetakan pemetaan Proses Bisnis –	Mengadakan workshop untuk menyesuaikan pemetaan Proses

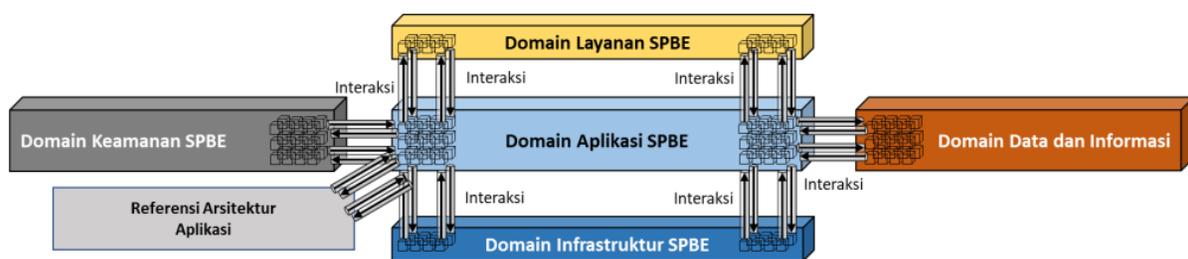
Area	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	Gap	Rencana Tindakan
	mengacu pada SOTK lama		SOTK baru, termasuk perubahan Probis karena perubahan fungsi	bisnis dengan SOTK baru

C. Arsitektur Aplikasi

1. Arsitektur Aplikasi Eksisting

Layanan SPBE yang dilakukan secara elektronik dihasilkan melalui sebuah aplikasi. Aplikasi SPBE diharapkan dapat mengakomodasi fungsi-fungsi yang perlu dilakukan untuk menghasilkan layanan tersebut. Dengan demikian aplikasi ini dapat berupa sebuah aplikasi ataupun pengintegrasian dari beberapa aplikasi. Aplikasi SPBE terhubung secara terintegrasi secara lintas sektoral, sehingga pembangunannya diwajibkan mengikuti kaidah pembangunan aplikasi SPBE sehingga mempermudah tata kelola aplikasi di lingkungan pemerintahan secara nasional.

Domain arsitektur aplikasi memiliki relasi langsung dengan referensi arsitektur dan dengan domain arsitektur lainnya, yaitu Domain Layanan, Domain Data dan Informasi, Domain Infrastruktur dan Domain Keamanan, seperti terlihat pada Gambar III.6.



Gambar III.6 Relasi Langsung Domain Aplikasi

Arsitektur Aplikasi eksisting LKPP dapat dilihat pada Tabel III.8.

Tabel III.8 Arsitektur Aplikasi Eksisting

ID (LKPP-DAA)	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Proses Bisnis	Data	Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)
01	ADP (Agregasi Data Penyedia)	Sistem Yang Dikembangkan Oleh LKPP			RAD.09.02.08	RAA.02.02 Aplikasi Khusus

ID (LKPP- DAA)	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Proses Bisnis	Data	Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)
		Yang Memungkinkan Satu Penyedia Yang Terdaftar Di Satu LPSE Dapat Mengikuti Lelang Di LPSE Lain Tanpa Melakukan Registrasi Dan Verifikasi Ulna			Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dan Manajemen Aset	Fungsi Tertentu
02	Apendo				RAD.09.02.08 Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dan Manajemen Aset	RAA.01.02.09 Aplikasi Data Dan Informasi Pemerintahan
03	Aplikasi Konsultasi Sertifikasi	Portal Yang Berfungsi Sebagai Sarana Pelayanan Konsultasi Terkait Sertifikasi PBJ	Akreditasi Dan Sertifikasi (6)	Pembentukan JF PPBJ (LKPP-DAB-02.03.02)	Rad.09.02.08 Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dan Manajemen Aset	Raa.01.01.44 Aplikasi Informasi
04	Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal (Amel)				Rad.09.02.08 Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dan	Raa.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu

ID (LKPP- DAA)	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Proses Bisnis	Data	Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)
					Manajemen Aset	
05	Aplikasi Pengelolaan Soal	Aplikasi Yang Digunakan Dalam Mengelola Soal Uji Kompetensi PBJ	Akreditasi Dan Sertifikasi (6), Diseminasi/ Sosialisasi /Pelatihan (03), Pengembang an Profesi Dan Kelembagaan PBJ(5)	Pembentuka n UKPBJ (LKPP-DAB- 02.03.01), Pembentuka n JF PPBJ (LKPP-DAB- 02.03.02)	Rad.06.01. 04 Pendidikan Non- Formal	Raa.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
06	Aplikasi SPSE Helpdesk				Rad.09.03. 04 Pengelolaa n Informasi Publik	Raa.01.01.4 4 Aplikasi Informasi
07	Aplikasi SPSE ICB (spseicb.lkpp. go.id/ spseicb/)				Rad.09.02. 08 Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dan Manajemen Aset	Raa.01.01.0 2 Aplikasi Urusan Luar Negeri
08	Bisa (Business Information And Supplier Platform) Pengadaan	Situs Yang Mempromosika n Pelaku Usaha (Pu) Dari Seluruh Indonesia Untuk Memudahkan K/L/Pd Seluruh Indonesia	Pelayanan Pengembang an Kapasitas Pelaku Usaha Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJP) (10)	Pembinaan Dan Dukungan Pbjp (Lkpp- Dab-02.04)	Rad.09.02. 08 Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dan Manajemen Aset	Raa.01.01.0 6 Aplikasi Perdagangan

ID (LKPP- DAA)	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Proses Bisnis	Data	Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)
		Mengetahui Pelaku Usaha Di Indonesia Dengan Berbagai Macam Klasifikasi Bisnisnya Masing- Masing.				
09	Centrum (centrum.lkpp .go.id/)					
10	Dashboard Deputi 4 (dashboard- hukumsangga h.lkpp.go.id/)				Rad.05.01. 01 Penyeleng- garaan Peraturan Dan Perundang- Undangan	Raa.01.01.2 8 Aplikasi Hukum
11	Dashboard LKPP	Dashboard Yang Menampilkan Informasi Kegiatan Prioritas LKPP, Tata Kelola Pengadaan Baik, Kehadiran Unit Organisasi, Dan Quick Win	- Pelayanan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Pid) Melalui Desk Layanan -Pelayanan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Pid) Melalui Website	Pengelolaan Data Dan Informasi	Rad.09.03. 04 Pengelolaa n Informasi Publik	Raa.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu
12	Data Collector Engine (dce.lkpp.go.i d/Dce5)				Rad.09.02. 08 Pengadaan Barang/Ja sa	Raa.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu

ID (LKPP- DAA)	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Proses Bisnis	Data	Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)
					Pemerintah Dan Manajemen Aset	
13	E-Advokasi (konsultasi.lk pp.go.id)				Rad.05.01. 01 Penyeleng- araan Peraturan Dan Perundang- Undangan	Raa.01.01.2 8 Aplikasi Hukum
14	E-Konsolidasi (konsolidasi.l kpp.go.id/)				Rad.09.02. 08 Pengadaan Barang/Ja sa Pemerintah Dan Manajemen Aset	Raa.01.02.0 2 Aplikasi Keuangan
15	E-Learning LKPP	Portal Web Yang Berfungsi Untuk Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Akreditasi Dan Sertifikasi (6), Diseminasi/S osialisasi /Pelatihan (03), Pengembanga n Profesi Dan Kelembagaan Pbj (5)	Pembentuka n Ukpbj (Lkpp-Dab- 02.03.01), Pembentuka n Jf Ppbj (Lkpp-Dab- 02.03.02)	Rad.09.06. 04 Manajemen ASN	Raa.01.01.3 1 Aplikasi Pendidikan
16	E-Office LKPP	Aplikasi Yang Digunakan Untuk Manajemen Perkantoran Yang Terdiri			Rad.09.06. 04 Manajemen ASN	Raa.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu

ID (LKPP- DAA)	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Proses Bisnis	Data	Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)
		Dari Modul Sdm, Modul Kinerja, Modul Persuratan, Modul Keuangan, Modul Peminjaman Ruang, Modul Tiketing, Modul Dokumentasi				
17	<i>E-Pengaduan (pengaduan.lkpp.go.id/)</i>				Rad.09.06.05 Manajemen Pelayanan Publik	Raa.01.01.28 Aplikasi Hukum
18	Inaproc Service Bus (inaproc.lkpp.go.id/isb)				Rad.09.02.08 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Manajemen Aset	Raa.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
19	Jaim (jaim.lkpp.go.id/)				Rad.09.03.01 Pengelolaan Informatika	Raa.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
20	JDIH (Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum)	Layanan Pusat Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Pelayanan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Pid) Melalui Desk Layanan (1) - Pelayanan	Pengelolaan Data Dan Informasi (Lkpp-Dab-03.07.02)	Rad.05.01.01 Penyelenggaraan Peraturan Dan Perundang-Undangan	Raa.01.01.28 Aplikasi Hukum

ID (LKPP- DAA)	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Proses Bisnis	Data	Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)
			Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Pid) Melalui Website (2)			
21	Katalog Elektronik & Epurchasing (E-katalog.lkpp.go.id)				Rad.09.02.08 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Manajemen Aset	Raa.01.01.06 Aplikasi Perdagangan
22	Kepo-PBJ	Sistem Informasi Referensi Materi/Pertanyaan/Informasi Pengadaan Barang/Jasa			Rad.09.03.04 Pengelolaan Informasi Publik	Raa.01.01.44 Aplikasi Informasi
23	Knowledge Management System ppsdm.lkpp.go.Id/kms	Knowledge Management System (Kms) Merupakan Sistem Untuk Memfasilitasi Kegiatan Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management) Yang Dapat Diakses Secara Daring. Dalam Hal Kaitannya Untuk Pengelolaan	Pid Dan Audiensi (01)	<i>Knowledge Management</i> (Lkpp-Dab-02.04.08)	Rad.06.01.04 Pendidikan Non-Formal	Raa.01.01.33 Aplikasi Ilmu Pengetahuan

ID (LKPP- DAA)	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Proses Bisnis	Data	Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)
		<p>Pengetahuan Terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dikembangkan Kms Pengadaan Barang/Jasa (Kms Pbj) Yang Bertujuan Untuk Menemukan, Menangkap, Dan Menyebarluask an Pengetahuan Terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>				
24	Konsolidasi	<p>Sistem Yang Memberikan Referensi Potensi Konsolidasi Paket Pekerjaan</p>			<p>Rad.09.02. 08 Pengadaan Barang/Ja sa Pemerintah Dan Manajemen Aset</p>	<p>Raa.01.02.09 Aplikasi Data Dan Informasi Pemerintahan</p>
25	<p>Layanan Sertifikasi Dan Advokasi (Modul Clearing House, Probity</p>	<p>Sistem Pendokumenta sian Kegiatan Clearing House, Probity Advice, Konsultasi</p>	<p>Konsultasi Dan Pendampingan (02)</p>	<p>Konsultasi, Advokasi, Pendamping an (Lkpp- Dab- 02.04.05), Pembentuka</p>	<p>Rad.05.01. 01 Penyelengg araan Peraturan Dan</p>	<p>Raa.01.01.2 8 Aplikasi Hukum</p>

ID (LKPP- DAA)	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Proses Bisnis	Data	Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)
	Advice, Konsultasi)			n Clearing House (Lkpp-Dab- 02.04.06)	Perundang- Undangan	
26	Layanan Sertifikasi Pbj (sertifikasipbj. lkpp.go.id)				Rad.09.02. 08 Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dan Manajemen Aset	Raa.01.01.4 4 Aplikasi Informasi
27	Logan (logan.lkpp.go .id/)					Raa.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
28	Lokal (Layanan Otomasi Keterangan Ahli Lkpp)	Layanan Yang Memfasilitasi Permohonan Pemberian Keterangan Ahli Di Bidang Pbj	Pelayanan Pemberian Keterangan Ahli (8)	Pembentukan Pemberian Keterangan Ahli Pka) (Lkpp-Dab- 02.03.04)	Rad.05.01. 01 Penyelengg araan Peraturan Dan Perundang- Undangan	Raa.01.01.2 8 Aplikasi Hukum
29	LPSE Support (lpse- support.lkpp. go.id/)	Sistem Tiketing Permasalahan Pada Aplikasi Spse Dan Pendukungnya			Rad.09.02. 08 Pengadaan Barang/Ja sa Pemerintah Dan Manajemen Aset	Raa.01.01.4 4 Aplikasi Informasi
30	Mail LKPP	Layanan Email Pegawai			Rad.09.07. 06 Pembinaan	Raa.02.02 Aplikasi Khusus

ID (LKPP- DAA)	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Proses Bisnis	Data	Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)
					Arsip Dinamis	Fungsi Tertentu
31	Modul JF PPBJ (ppsdm.lkpp.g o.id)				Rad.06.01. 04 Pendidikan Non- Formal	Raa.01.01.3 3 Aplikasi Ilmu Pengetahua n
32	Modul Pelatihan (ppsdm.lkpp.g o.id)				Rad.06.01. 04 Pendidikan Non- Formal	Raa.01.01.3 3 Aplikasi Ilmu Pengetahua n
33	Monev Katalog (Monev-E- Katalog.lkpp.g o.id)				Rad.09.03.0 2 Pengelolaan Data Statistik	Raa.01.01.4 4 Aplikasi Informasi
34	Office Collaboration Tools	Layanan pegawai untuk menggunakan <i>Document Processing</i> sehingga dapat berkolaborasi antar pegawai			Rad.09.07. 06 Pembinaan Arsip Dinamis	Raa.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
35	Pendampingan (Pendampingan. lkpp.go.id), Tidak Aktif					
36	Pengaman Dokumen					
37	Perpustakaan LKPP (Slims)	Aplikasi Yang Digunakan Untuk Pengelolaan Koleksi Buku Yang Ada Di Perpustakaan.		Layanan Tata Usaha: Buku Perpustakaan (Lkpp-Dab- 03.04.02)		Raa.01 Aplikasi Umum

ID (LKPP- DAA)	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Proses Bisnis	Data	Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)
38	Pkms (Pkms.lkpp.go .id), Tidak Aktif					
39	Portal Deputi Hukum Sanggah					
40	Portal Eproc (Eproc.lkpp.go .id/)					
41	Portal Pengadaan Nasional, Inaproc (inaproc.id/)	Pintu Gerbang Sistem Informasi Elektronik, Memuat Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Nasional Yang Dikelola Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)				
42	PPID	Sistem Informasi Yang Menyebarkan Informasi Mengenai Kebijakan, Program Dan Kinerja Lkpp Kepada Publik	- Pelayanan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Pid) Melalui Desk Layanan -Pelayanan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi			Raa.01.02.0 9 Aplikasi Data Dan Informasi Pemerintah an

ID (LKPP- DAA)	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Proses Bisnis	Data	Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)
			(Pid) Melalui Website			
43	PPSDM	Portal PPSDM Merupakan One-Stop-Solution Dalam Mendukung Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Dibidang Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ). Portal PPSDM Dikembangkan Oleh Kedeputian Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Dan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.	Akreditasi Dan Sertifikasi (6), Diseminasi/Sosialisasi /Pelatihan (03), Pengembangan Profesi Dan Kelembagaan Pbj (5)	Pembentukan Ukpbj (Lkpp-Dab-02.03.01), Pembentukan Jf Ppbj (Lkpp-Dab-02.03.02)		
44	Probitly Advice (Probitly.lkpp.go.id), Tidak Aktif					
45	Procedia (procedia.lkpp.go.Id/Site/Lo					

ID (LKPP- DAA)	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Proses Bisnis	Data	Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)
	gin), Tidak Aktif					
46	Reformasi Birokrasi (rb.lkpp.go.id)	Sistem Informasi Berbasis Website Yang Menggambarkan Penyelenggaraan Pemerintahan Terutama Menyangkut Aspek-Aspek Kelembagaan (Organisasi), Ketatalaksanaan Dan Sumber Daya Manusia Aparatur Di Lkpp				Raa.01.02.08 Aplikasi Organisasi Dan Tata Kelola
47	Rekrutmen LKPP	Aplikasi Untuk Pengelolaan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pegawai Di Lingkungan Lkpp Di Luar Pengadaan Cpns Dan Pppk		Perencanaan Kebutuhan Dan Organisasi (Lkpp-Dab-03.05.02) Pengadaan Pegawai (Lkpp-Dab-03.05.03)		Raa.01.02.08 Aplikasi Organisasi Dan Tata Kelola
48	Satu Data Eproc (inaproc.id/Satudata)					
49	Sielsa (sielsa.lkpp.go					

ID (LKPP- DAA)	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Proses Bisnis	Data	Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)
	.id/), Tidak Aktif					
50	<u>Sikap (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) : Sikap.lkpp.go.id</u>	Aplikasi Yang Merupakan Subsistem Dari Spse Yang Digunakan Untuk Mengelola Data/Informasi Mengenai Data Kualifikasi Pelaku Usaha Dan Riwayat Kinerja Penyedia Barang/Jasa	-			
51	Siperpindahan: Perpindahan.lkpp.go.id	Aplikasi Yang Dapat Menyajikan Data Dan/Atau Informasi Rekapitulasi Pengusulan Formasi Perpindahan Dari Jabatan Lain, Rekapitulasi Pelaksanaan Formasi Perpindahan Dari Jabatan Lain, Portofolio Peserta, Jadwal Uji Kompetensi, Riwayat Ujian	Pengembangan Profesi Dan Kelembagaan PBJ (5)	Pembentukan UKPBJ (Lkpp-Dab-02.03.01), Pembentukan JF PPBJ (Lkpp-Dab-02.03.02)		

ID (LKPP- DAA)	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Proses Bisnis	Data	Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)
		Peserta Dan Rekap Surat Rekomendasi				
52	Sipraja (Sistem Informasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa)	Situs Layanan Terpadu Yang Menyelenggara kan Layanan Penginformasia n, Penafsiran, Dan Diseminasi Peraturan Perundang- Undangan Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Pelayanan Penafsiran Peraturan Perundang- Undangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (4) - Layanan Diseminasi Perundang- Undangan Di Bidang PBJ (09) - Layanan Diseminasi Perundang- Undangan Di Bidang PBJ (09)	Perumusan Kebijakan PBJP (Lkpp- Dab- 02.01.01)		Raa.01.01.2 8 Aplikasi Hukum
53	Sirangga (eoffice.lkpp.g o.id/)					
54	Siremon (Sistem Perencanaan Aktivitas Dan Anggaran Serta Monitoring Kinerja Internal LKPP)	Sistem Informasi Terkait Kinerja Lkpp, Juga Sebagai Bahan Pelaporan E- Monev Bappenas. Sub Aplikasi Rencana		Pemantauan , Evaluasi Dan Pelaporan (01.03)		Raa.02 Aplikasi Khusus

ID (LKPP- DAA)	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Proses Bisnis	Data	Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)
		Penarikan Anggaran (Rpa) Digunakan Untuk Menghitung Penarikan Anggaran Berdasarkan Rencana Aktivitas				
55	Sirenaksi (Sistem Informasi Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa): sirenaksi.lkpp.go.id	Aplikasi Yang Dapat Menyajikan Data Dan/Atau Informasi Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ	Pengembangan Profesi Dan Kelembagaan PBJ (5)	Pembentukan UKPBJ (LKPP-DAB-02.03.01), Pembentukan Jf Ppbj (Lkpp-Dab-02.03.02)		
56	Sirup, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (sirup.lkpp.go.id/)	Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Berbasis Web Yang Fungsinya Sebagai Sarana Atau Alat Untuk Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan				
57	Sistem Informasi Manajemen	Aplikasi Yang Digunakan Untuk	Pelayanan Pengaduan Publik	Tata Kelola (LKPP-DAB-01.02),		

ID (LKPP- DAA)	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Proses Bisnis	Data	Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)
	Continuous Audit Dan Continuous Monitoring (SIMCACM)	Mengelola Manajemen Risiko, Manajemen Pengawasan Intern, Manajemen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Evaluasi Berkelanjutan Serta Audit Berkelanjutan Dan Pemantauan Berkelanjutan Proses Pengadaan Barang/Jasa Di LKPP		Manajemen Resiko (LKPP-DAB- 01.03), Pengendalian Internal (LKPP-DAB- 01.04)		
58	Siukpbj (Sistem Informasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa): siukpbj.lkpp.g o.id	Aplikasi Yang Dapat Menyajikan Data Dan/Atau Informasi Pemantauan, Penilaian Lapangan, Kerjasama Antara UKPBJ, Agen Pengadaan, Pusat Informasi Unduh Dan Tingkat				

ID (LKPP- DAA)	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Proses Bisnis	Data	Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)
		Kematangan UKPBJ				
59	Spamkodok					
60	Spse (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)	Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Merupakan Aplikasi E- Procurement				
61	Spse Authenticator					
62	SPSE Docs					
63	Temanku (Sistem Informasi Pengadaan Khusus)	Sistem Informasi Pengadaan Khusus Yang Memublikasik an Kajian, Infografis, Informasi Lainnya, Menyediakan Layanan Permohonan Konsultasi Dan Pendampingan Untuk Pengadaan Khusus (Kpbu, Desa, Blu/D, Bumn/D, Dan Badan Hukum Publik).	- Pelayanan Penafsiran Peraturan Perundang- Undangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (4) - Layanan Diseminasi Perundang- Undangan Di Bidang PBJ (09) - Layanan Diseminasi Perundang- Undangan Di Bidang PBJ (09)	Perumusan Kebijakan PBJP (LKPP- DAB- 02.01.01)		

ID (LKPP- DAA)	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Proses Bisnis	Data	Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)
64	Toko Daring (tokodaring.lk pp.go.id)	Sistem Epurchasing Yang Memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Yang Berbentuk Marketplace Atau Ritel Daring.				
65	UBK (Ujian Berbasis Komputer) Level-1	Aplikasi Ujian Yang Digunakan Untuk Pelaksanaan Uji Kompetensi PBJ Level-1	Akreditasi Dan Sertifikasi (6), Diseminasi/S osialisasi /Pelatihan (03), Pengembangan Profesi Dan Kelembagaan PBJ (5)	Pembentukan Ukpbj (LKPP-DAB- 02.03.01), Pembentukan JF PPBJ (LKPP-DAB- 02.03.02)		Raa.02 Aplikasi Khusus
66	Ubk Skj (Ujian Berbasis Komputer Standard Kompetensi Jabatan)(Penj enjangan)	Aplikasi Ujian Yang Digunakan Untuk Pelaksanaan Tes Tertulis Pada Uji Kompetensi Penjenjangan JF PPBJ	Akreditasi Dan Sertifikasi (6), Diseminasi/S osialisasi /Pelatihan (03), Pengembangan Profesi Dan Kelembagaan PBJ (5)	Pembentukan UKPBJ (LKPP-DAB- 02.03.01), Pembentukan JF PPBJ (LKPP-DAB- 02.03.02)		

ID (LKPP- DAA)	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Proses Bisnis	Data	Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)
67	Website Inspektorat	Sistem Informasi Kegiatan Inspektorat		Pengawasan Internal (LKPP-DAB- 01.04)		
68	Website LKPP	Sistem Informasi Utama Yang Menyebark an Informasi Lkpp Dan Sebagai "Hub Page"	- Pelayanan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PID) Melalui Desk Layanan -Pelayanan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PID) Melalui Website			RAA.01 Aplikasi Umum
69	Whistle Blower System (wbs.inaproc.i d/)	Sistem Untuk Memproses Pengaduan Yang Dapat Dimanfaatkan Oleh Whistleblower Untuk Mengadukan Dugaan Pelanggaran Di Bidang PBJP		Pengawasan Internal (LKPP-DAB- 01.04)		
70	Whistleblowin g System (Internal) (wbs.lkpp.go.i d)	Sarana Pengaduan Masyarakat Dengan Saluran Tertutup (Whistleblowing System) Yang Ditunjukkan Atas		Pengawasan Internal (LKPP-DAB- 01.04)		Raa.02 Aplikasi Khusus

ID (LKPP-DAA)	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Proses Bisnis	Data	Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)
		Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pegawai LKPP				

2. Analisis Gap Arsitektur Aplikasi

Tabel III.9 Analisis Gap Arsitektur Aplikasi

Area	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	Gap	Rencana Tindakan
Penyederhanaan aplikasi	Satu jenis layanan-banyak aplikasi	Penyatuan layanan dalam 1 portal (portal layanan publik dan portal administrasi pemerintahan)	Banyak aplikasi menyulitkan baik untuk pengguna dan untuk pengelola SPBE	Konsolidasi seluruh aplikasi SPBE kedalam portal layanan publik dan Portal Administrasi Pemerintahan sebagai transmisi ke Portal Nasional

D. Arsitektur Data dan Informasi

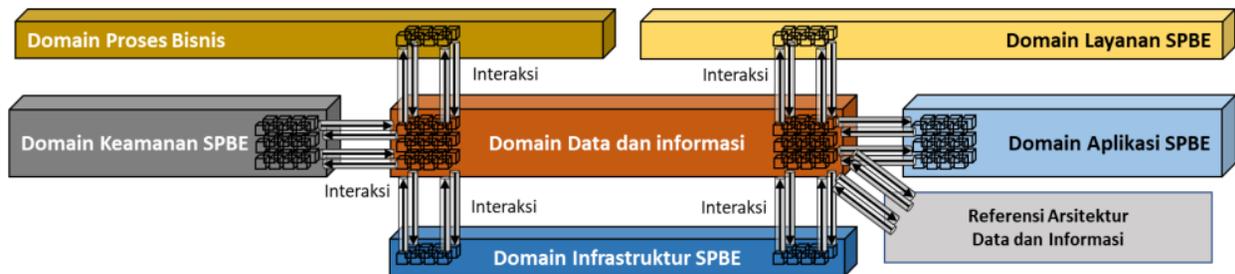
Pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya data dan informasi yang dapat dipercaya. Dalam membangun tersedianya data dan informasi ini, pemetaan atas data dan informasi di lingkungan pemerintahan diperlukan sehingga pertanggungjawaban atas kualitas data dapat dilaksanakan dengan baik.

Domain arsitektur data dan informasi disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada proses bisnis dan layanan di pemerintahan yang sudah diklasifikasikan dalam referensi arsitektur data dan informasi. Domain arsitektur data dan informasi digunakan untuk mengetahui data apa saja yang digunakan dalam proses bisnis, ataupun layanan SPBE yang sifatnya berdiri sendiri, serta dengan prinsip yang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia. Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Kerangka

kerja dari arsitektur data dan informasi terdiri atas referensi arsitektur data dan informasi serta domain arsitektur data dan informasi, serta keterkaitannya dengan domain arsitektur yang lainnya

1. Arsitektur Data dan Informasi Eksisting

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Arsitektur SPBE terdiri atas Referensi Arsitektur SPBE dan Domain Arsitektur SPBE, yaitu keterkaitan antara domain arsitektur dengan domain arsitektur lain dan referensi arsitektur. Relasi langsung domain arsitektur data dan informasi dapat dilihat pada Gambar III.7



Gambar III.7 Relasi Langsung pada domain Data dan Informasi

Pada Arsitektur data dan informasi, dijabarkan relasi langsung dengan referensi arsitektur data dan informasi dan dengan domain arsitektur proses bisnis dan arsitektur layanan, sedangkan relasi dengan domain aplikasi dan data dan informasi, dijelaskan ketika menjabarkan domain arsitektur aplikasi dan domain keamanan SPBE. Domain Arsitektur Data dan Informasi eksisting LKPP dapat dilihat pada Tabel III.10

Tabel III.10 Arsitektur Data dan Informasi Eksisting

ID (LKPP-DAD)	Nama Data	Uraian Data	Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD)	Proses Bisnis	Layanan
01	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Data yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dengan ukuran kematangan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara berjenjang melalui 5	RAD.09.06.05 Manajemen Pelayanan Publik	Pembentukan UKPBJ (LKPP-DAB-02.03.01)	Layanan Pembentukan UKPBJ (LKPP-DAL-05.06), Layanan Pembinaan Kepala UKPBJ (LKPP-DAL-05.08),

ID (LKPP- DAD)	Nama Data	Uraian Data	Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD)	Proses Bisnis	Layanan
		(lima) tingkat kematangan UKPBJ.			Layanan peningkata n kapabilitas UKPBJ (LKPP-DAL- 05.09)
02	Data Naskah Dinas	Data Naskah Dinas adalah kumpulan data dari seluruh naskah dinas yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).	RAD.09.07.06 Pembinaan Arsip Dinamis		
03	Data Informasi Publik	Data yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang- Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.	RAD.09.03.04 Pengelolaan Informasi Publik		
04	Data Regulasi	Data Regulasi adalah kumpulan peraturan Perundang-	RAD.05.01.01 Penyelenggaraan Peraturan dan		

ID (LKPP- DAD)	Nama Data	Uraian Data	Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD)	Proses Bisnis	Layanan
		undangan, kebijakan, dan dokumen lainnya yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.	Perundang-undangan		
05	Data kegiatan Audit Inspektorat	Data kegiatan Audit Inspektorat adalah data yang berisi informasi tentang kegiatan audit yang dilakukan oleh Inspektorat di LKPP. Data ini dapat berupa data kuantitatif, seperti jumlah audit yang dilakukan, jumlah auditor yang terlibat, dan anggaran yang digunakan, maupun data kualitatif, seperti hasil audit dan rekomendasi yang diberikan.	RAD.09.06.02 Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan		
06	Data literasi Perpustakaan	Data yang berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam menggunakan perpustakaan. Data ini meliputi data tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dalam menggunakan perpustakaan	RAD.08.02.05 Pembinaan Pusat		

ID (LKPP- DAD)	Nama Data	Uraian Data	Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD)	Proses Bisnis	Layanan
07	Data Rekrutmen Jabatan	Data yang berkaitan dengan proses rekrutmen dan seleksi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Data ini meliputi data pelamar, data instansi, data jabatan, dan data hasil seleksi.	RAD.09.06.04 Manajemen ASN		
08	Data Paket RUP, Data Anggaran, Data pengguna SIRUP		RAD.09.02.08 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Aset		
09	Data Paket dan Transaksi PBJ		RAD.09.02.08 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Aset		
10	Data Anggaran dan Pembayaran	Data yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Data ini meliputi data anggaran, data realisasi anggaran, dan data pembayaran.	RAD.09.02.10 Akuntabilitas Penggunaan Anggaran		
11	Data Pemenuhan JF PPBJ	data yang berisi informasi mengenai pemenuhan kebutuhan Jabatan	RAD.09.06.04 Manajemen ASN		

ID (LKPP- DAD)	Nama Data	Uraian Data	Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD)	Proses Bisnis	Layanan
		Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di Kementerian/Lemba ga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda)			
12	Data Perpindahan JF PPBJ dari JF lain	Data Perpindahan JF PPBJ dari JF lain adalah data yang berisi informasi mengenai pengangkatan pejabat dari jabatan lain ke dalam JF PPBJ. Data ini dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Sistem Informasi Perpindahan dari Jabatan Lain (SIPerpindahan).	RAD.09.06.04 Manajemen ASN		
13	Data Sertifikasi Kompetensi PBJ	Data yang memuat peserta uji sertifikasi kompetensi PBJ, kegiatan pelatihan sertifikasi PBJ, lembaga penyelenggara uji sertifikasi PBJ, dan data pemilik sertifikasi PBJ.	RAD.09.06.04 Manajemen ASN		

ID (LKPP- DAD)	Nama Data	Uraian Data	Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD)	Proses Bisnis	Layanan
14	Data layanan Konsultasi Sertifikasi	Data layanan Konsultasi Sertifikasi Kompetensi PBJ merupakan kumpulan data yang diperoleh dari proses konsultasi sertifikasi kompetensi PBJ.	RAD.09.06.04 Manajemen ASN		
15	Data Pelatihan SDM PBJ	Data kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi baik secara mandiri maupun melalui lembaga penyelenggara pelatihan.	RAD.09.06.04 Manajemen ASN		
16	Data Lembaga Pelatihan PBJ	Data lembaga penyelenggara pelatihan yang terdaftar di Lembaga	RAD.09.06.04 Manajemen ASN		
17	Data Produk, Penyedia Produk dan Transaksi Produk		RAD.09.02.08 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Aset		
18	Data Profiling Pelaku Usaha		RAD.09.02.08 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Aset		
19	Data tender/seleksi internasional		RAD.09.02.08 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Aset		

ID (LKPP- DAD)	Nama Data	Uraian Data	Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD)	Proses Bisnis	Layanan
20	Data Permasalahan SPSE		RAD.09.02.08 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Aset		
21	Data Profiling SPSE		RAD.09.02.08 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Aset		
22	Data log pekerjaan harian	Data kegiatan atau aktivitas yang dilakukan selama hari kerja. Log ini mencakup informasi terkait tugas-tugas yang telah diselesaikan, dan kemajuan proyek atau pekerjaan secara keseluruhan. Data log pekerjaan harian dicatat dalam aplikasi e-Office LKPP.	RAD.09.06.02 Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan		
23	Data RENSTRA dan RENJA LKPP		RAD.09.05.02.0 1 Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah		
24	Data Potensi Konsolidasi		RAD.09.02.08 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Aset		
25	Data WBS	Data pengaduan masyarakat melalui saluran tertutup	RAD.09.07.04 Pengawasan Pemerintahan		

ID (LKPP- DAD)	Nama Data	Uraian Data	Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD)	Proses Bisnis	Layanan
		<i>(whistleblowing system)</i> yang ditunjukkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai LKPP.			
26	Data Pemberi Keterangan Ahli (PKA)	Data PKA adalah kumpulan data yang berisi informasi tentang PKA, termasuk nama, alamat, nomor telepon, alamat email, bidang keahlian, dan pengalaman kerja.	RAD.05.01.06 Penegakan Hukum		
27	Data Pengaduan PBJ	Data atau laporan yang diterima terkait dengan pelaksanaan proses PBJ. Pengaduan dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk peserta lelang, pihak yang terlibat dalam pengadaan, atau masyarakat umum. Data pengaduan PBJ mencakup informasi mengenai keluhan, masalah, atau saran yang diajukan terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Pengaduan ini dapat melibatkan berbagai aspek,	RAD.09.07.04 Pengawasan Pemerintahan		

ID (LKPP-DAD)	Nama Data	Uraian Data	Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD)	Proses Bisnis	Layanan
		seperti pelanggaran prosedur pengadaan, atau ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku.			

2. Analisis Gap Arsitektur Data dan Informasi

Tabel III.11 Analisis Gap Data dan Informasi

Area	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	Gap	Rencana Tindakan
Relasi antar domain arsitektur	Relasi antar domain belum dipetakan	Relasi antar domain arsitektur data dan informasi dengan arsitektur Proses bisnis dan Layanan	Belum dipetakannya relasi antar domain berpotensi menyulitkan dalam melakukan evaluasi	Mengadakan workshop untuk melengkapi dokumen arsitektur data dan informasi lengkap dengan relasi antar domain arsitektur lainnya

E. Arsitektur Infrastruktur SPBE

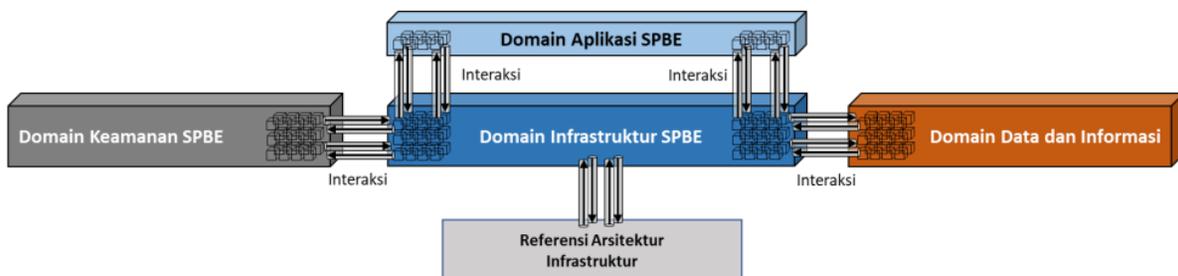
Domain infrastruktur SPBE akan memetakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya, yang digunakan untuk menghasilkan layanan.

Penyusunan referensi arsitektur pada domain infrastruktur SPBE bertujuan untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur SPBE yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE.

Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur SPBE yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur SPBE yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilisasinya, agar infrastruktur SPBE dapat dipergunakan secara terpadu serta efektif dan efisien. Dalam hal ketersediaan ini belum tercapai, maka digunakan infrastruktur yang ada, yang dikoordinasikan dalam domain infrastruktur SPBE.

1. Arsitektur Infrastruktur Eksisting

Domain Infrastruktur memiliki relasi langsung dengan domain aplikasi, domain data dan informasi dan domain Keamanan. Domain Infrastruktur juga mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur, seperti terlihat pada Gambar III.8.



Gambar III.8 Relasi Langsung pada domain Infrastruktur

Domain infrastruktur dijabarkan dalam sepuluh tabel terpisah sesuai jenis infrastruktur, yaitu:

1. Infrastruktur Awan (*Cloud*)
2. Infrastruktur *Hardware Platform*
3. Infrastruktur *Hardware Server*
4. Infrastruktur *Hardware Media Penyimpanan*
5. Infrastruktur *Hardware Jaringan*
6. Infrastruktur Keamanan
7. Infrastruktur *Hardware Peripheral*
8. Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah
9. Infrastruktur Sistem Penghubung Layanan
10. Infrastruktur Fasilitas Komputer

Relasi antara domain infrastruktur dengan domain lainnya tidak ditunjukkan pada setiap tabel. Akan tetapi, relasinya dengan domain lainnya dapat dilihat dari seluruh tabel. Domain infrastuktur dapat dilihat pada Tabel III.12 sampai Tabel III.21.

Tabel III.12 Infrastruktur Cloud

ID (LKPP- DAI)	Nama Gov. Cloud	Deskripsi Gov. Cloud	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Aplikasi	Data dan Informasi	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
01.01	VDC Pusdatin PDNS	Layanan Cloud Government Kominfo	RAI.02.01 jaringan Intra Pemerintah	PPID LKPP	DIP dan DIK LKPP	Perban BSSN 4 Tahun 2021
01.02	VDC SPSE	Layanan Cloud Government Kominfo	RAI.02.01 jaringan Intra Pemerintah	SPSE	Data Pengadaan	Perban BSSN 4 Tahun 2022
01.03	BIG DATA On PDNS	Layanan Big Data as a Service Kominfo				Perban BSSN 4 Tahun 2022

Tabel III.13 Infrastruktur Hardware Platform

ID (LKPP-DAI)	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Fasilitas Komputasi	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
02.01	Linux	Perangkat lunak sistem operasi yang khusus digunakan untuk server	RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform	DC LKPP	SMKI
02.02	My SQL	sistem manajemen database relasional (RDBMS) open-source berbasis SQL yang bekerja dengan model client-server	RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform	DC LKPP	SMKI
02.03	Postgre SQL	sistem manajemen database relasional (RDBMS) open-source berbasis SQL yang bekerja dengan model client-server	RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform	DC LKPP	SMKI
02.04	Windows Server	Perangkat lunak sistem operasi yang khusus digunakan untuk server	RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform	DC LKPP	SMKI

ID (LKPP-DAI)	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Fasilitas Komputasi	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
02.05	PuTTY	Perangkat lunak SSH dan Telnet klien yang dapat di gunakan untuk mengakses server dengan basic command line	RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform	DC LKPP	SMKI
02.06	Microsoft Office 365	Perangkat lunak operasional perkantoran	RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform	DC LKPP	SMKI
02.07	Cisco IOS	Perangkat lunak sistem operasi yang khusus digunakan untuk server	RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform	DC LKPP	SMKI
02.08	Aruba OS	Perangkat lunak sistem operasi yang khusus digunakan untuk server	RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform	DC LKPP	SMKI
02.09	Forti OS	Perangkat lunak sistem operasi yang khusus digunakan untuk server	RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform	DC LKPP	SMKI

Tabel III.14 Infrastruktur Hardware Server

ID (LKPP- DAI)	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Proses Bisnis	FasKom	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
03.01	Sun Oracle Sever X7-2	Production Server 1	Web Server	RAI.01.02 Pusat Komputasi		DC LKPP - internet utama	Perban BSSN 4 Tahun 2021 dan SMKI
03.02	Sun Oracle Sever X7-2	Production Server 2	Web Server	RAI.01.02 Pusat Komputasi		DC LKPP - internet utama	Perban BSSN 4 Tahun 2021 dan SMKI
03.03	HPE Proliant DL380 Gen10	Development Server 1	Web Server	RAI.01.02 Pusat Komputasi		DC LKPP - internet utama	Perban BSSN 4 Tahun 2021 dan SMKI
03.04	HPE Proliant DL380 Gen10	Development Server 2	Web Server	RAI.01.02 Pusat Komputasi		DC LKPP - internet utama	Perban BSSN 4 Tahun 2021 dan SMKI
03.05	HPE Proliant DL380 Gen9	Pre Production Server 1	Web Server	RAI.01.02 Pusat Komputasi		DC LKPP - internet utama	Perban BSSN 4 Tahun 2021 dan SMKI
03.06	HPE Proliant DL380 Gen8	Production Server 3	Web Server	RAI.01.02 Pusat Komputasi		DC LKPP - internet utama	Perban BSSN 4 Tahun 2021 dan SMKI

ID (LKPP- DAI)	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Proses Bisnis	FasKom	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
03.07	HPE Proliant DL380 Gen9	Production Server 4	Web Server	RAI.01.02 Pusat Komputasi		DC LKPP - internet utama	Perban BSSN 4 Tahun 2021 dan SMKI
03.08	HPE Proliant DL380 Gen7	Laboratorium Server 1	Web Server	RAI.01.02 Pusat Komputasi		DC LKPP - internet utama	Perban BSSN 4 Tahun 2021 dan SMKI
	Lenovo Thinksystem SR630	Server Development		RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Lenovo Thinksystem SR630	Server Development		RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Dell PowerEdge R820	Server Development		RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Dell PowerEdge R820	Server Development		RAI.01.02 Pusat Komputasi			

ID (LKPP- DAI)	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Proses Bisnis	FasKom	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
	Dell PowerEdge R820	Server Development		RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Oracle server X5-4			RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Oracle server X5-4			RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Oracle server X5-4			RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Oracle Server X5-8			RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Oracle Server X5-8			RAI.01.02 Pusat Komputasi			

ID (LKPP- DAI)	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Proses Bisnis	FasKom	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
214	Computer Node Component SUPERMICRO SUPER SERVER 7088B-TR4FT			RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Sun ORACLE Sparc T5-4			RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Server Oracle T8	Server Development		RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Server Oracle T8	Server Development		RAI.01.02 Pusat Komputasi			

ID (LKPP- DAI)	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Proses Bisnis	FasKom	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
	Dell PowerEdge R820	Server Development		RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Dell PowerEdge R820	Server Development		RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Dell PowerEdge R820	Server Development		RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	FUJITSU PY RX2530 M1			RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	FUJITSU PY RX2530 M1			RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	ORACLE X5- 2L			RAI.01.02 Pusat Komputasi			

ID (LKPP- DAI)	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Proses Bisnis	FasKom	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
	ORACLE X5-2L			RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	FUJITSU M10-4			RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	SuperServer SYS 2028TP HC1R Supermicro			RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	SuperServer SYS 2028TP HC1R Supermicro			RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Nutanix NX-3460-G6 4			RAI.01.02 Pusat Komputasi			

ID (LKPP- DAI)	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Proses Bisnis	FasKom	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
	Core Controller Node Component SUPERMICRO SUPER SERVER 6018U-TR4T+ (S1665342772 3422)			RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Core Controller Node Component SUPERMICRO SUPER SERVER 6018U-TR4T+ (S1665342772 3408)			RAI.01.02 Pusat Komputasi			

ID (LKPP- DAI)	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Proses Bisnis	FasKom	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
	Core Controller Node Component SUPERMICRO SUPER SERVER 6018U-TR4T+ (S1665342772 3417)			RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Nutanix NX- 1365-G7			RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Fujitsu type PRIMEQUEST			RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Nutanix			RAI.01.02 Pusat Komputasi			

ID (LKPP- DAI)	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Proses Bisnis	FasKom	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
	ORACLE X5-2L			RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Oracle Server X5-8			RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Oracle Server X5-8			RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Oracle Server X5-8			RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Dell PowerEdge R820			RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Dell PowerEdge R820			RAI.01.02 Pusat Komputasi			

ID (LKPP- DAI)	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Proses Bisnis	FasKom	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
	Dell PowerEdge R820			RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Supermicro	Server Development		RAI.01.02 Pusat Komputasi			
	Supermicro	Server Development		RAI.01.02 Pusat Komputasi			

Tabel III.15 Infrastruktur Media Penyimpanan

ID (LKPP- DAI)	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data dan Informasi	Perangkat Lunak Platform	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Perangkat Keras Server	Fasilitas Komputasi	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
04.01	Dell EMC Unity 380 XT	Untuk menyimpan data pada data center	Database dan Aplikasi	Linux	RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)	Server Clustering	Ruang Data Center Pusdatin LKPP	Perban BSSN 4 Tahun 2021 dan SMKI
04.02	Dell EMC VNX 5200	Untuk menyimpan data pada data center	Database dan Aplikasi	Linux	RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)	Server Clustering	Ruang Data Center Pusdatin LKPP	Perban BSSN 4 Tahun 2021 dan SMKI
04.03	QNAP TS-EC 1680U	Untuk menyimpan data pada data center	Database dan Aplikasi	Linux	RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)	Server Clustering	Ruang Data Center Pusdatin LKPP	Perban BSSN 4 Tahun 2021 dan SMKI
04.04	QNAP TS-EC 1680U	Untuk menyimpan data pada data center	Database dan Aplikasi	Linux	RAI.03.01.02 Media Penyimpan	Server Clustering	Ruang Data Center	Perban BSSN 4 Tahun

ID (LKPP- DAI)	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data dan Informasi	Perangkat Lunak Platform	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Perangkat Keras Server	Fasilitas Komputasi	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
					(Data Storage)		Pusdatin LKPP	2021 dan SMKI
04.05	QNAP TS- 1673AU-RP	Untuk menyimpan data pada data center	Database dan Aplikasi	Linux	RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)	Server Clustering	Ruang Data Center Pusdatin LKPP	Perban BSSN 4 Tahun 2021 dan SMKI
04.06	NetApp (Cluster)	Untuk mem- backup data	Database dan Aplikasi		RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)		DCI Indonesia	
04.07	Storage Node Component SUPERMICRO SUPERSTORAGE 6048R-E1CR60N (Cluster)	Untuk mem- backup data	Database dan Aplikasi	CentOs 7	RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)		DCI Indonesia	

ID (LKPP- DAI)	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data dan Informasi	Perangkat Lunak Platform	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Perangkat Keras Server	Fasilitas Komputasi	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
	Unity 480F DPE 25x2.5" Dell Field Rack	Untuk mem- backup data	Database dan Aplikasi		RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)		DCI Indonesia	

Tabel III.16 Infrastruktur hardware jaringan

ID (LKPP- DAI)	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Faskom	Perangkat Lunak Platform	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
05.01	Cisco Catalyst 3850-24XS	Core Swicth	Switch L3	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Cisco IOS	SMKI
05.02	Fortiswitch 1048D	Dev Switch	Switch L3	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Forti OS	SMKI
05.03	Cisco Catalyst 3650	Server Switch	Switch L3	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Cisco IOS	SMKI
05.04	HPE 5140	DMZ Switch	Switch L3	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI

ID (LKPP- DAI)	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Faskom	Perangkat Lunak Platform	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
05.05	Aruba S3500-24T	Distribution Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.06	Aruba S2540-48G	Distribution Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.07	Aruba7030	Wireless Controller	Wireless Equipment	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.08	Aruba7030	Wireless Controller	Wireless Equipment	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.09	Aruba S1500-24P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat	DC LKPP -	Aruba OS	SMKI

ID (LKPP- DAI)	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Faskom	Perangkat Lunak Platform	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
				Keras Jaringan	internet utama		
05.10	Cisco 2960S- 24PS	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Cisco IOS	SMKI
05.11	Aruba S1500- 48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.12	Aruba S1500- 48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.13	Aruba S1500- 48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI

ID (LKPP- DAI)	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Faskom	Perangkat Lunak Platform	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
05.14	Aruba S3500-24T	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.15	Aruba S1500-48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.16	Aruba 2540-48G	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.17	Aruba S1500-24P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.18	Fortiswitch 524D-FPOE	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat	DC LKPP -	Forti OS	SMKI

ID (LKPP- DAI)	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Faskom	Perangkat Lunak Platform	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
				Keras Jaringan	internet utama		
05.19	Aruba S1500- 48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.20	Aruba S1500- 48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.21	Aruba S1500- 48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.22	Aruba S1500- 24P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI

ID (LKPP- DAI)	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Faskom	Perangkat Lunak Platform	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
05.23	Aruba 2540-48G	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.24	Fortiswitch 524D-FPOE	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Forti OS	SMKI
05.25	Aruba S1500- 48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.26	Aruba S1500- 48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.27	Aruba S1500- 48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat	DC LKPP -	Aruba OS	SMKI

ID (LKPP- DAI)	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Faskom	Perangkat Lunak Platform	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
				Keras Jaringan	internet utama		
05.28	Aruba S1500- 48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.29	Fortiswitch 524D-FPOE	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Forti OS	SMKI
05.30	Aruba S1500- 48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.31	Aruba S1500- 24P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI

ID (LKPP- DAI)	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Faskom	Perangkat Lunak Platform	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
05.32	Aruba S1500-48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.33	Aruba S1500-48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.34	Aruba S1500-48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.35	Aruba 2540-48G	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.36	Aruba S1500-48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat	DC LKPP -	Aruba OS	SMKI

ID (LKPP- DAI)	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Faskom	Perangkat Lunak Platform	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
				Keras Jaringan	internet utama		
05.37	Aruba S1500-48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.38	Aruba S1500-48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.39	Aruba S1500-48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.40	Aruba 2540-48G	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI

ID (LKPP- DAI)	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Faskom	Perangkat Lunak Platform	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
05.41	Aruba S1500-48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.42	Aruba S1500-48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.43	Aruba S1500-48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.44	Aruba S1500-48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.45	Aruba S1500-48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat	DC LKPP -	Aruba OS	SMKI

ID (LKPP- DAI)	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Faskom	Perangkat Lunak Platform	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
				Keras Jaringan	internet utama		
05.46	Aruba S1500- 24P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.47	Aruba S1500- 48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.48	Aruba S1500- 48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.49	Aruba S1500- 48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI

ID (LKPP- DAI)	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Faskom	Perangkat Lunak Platform	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
05.50	Aruba S1500-48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.51	Aruba S1500-24P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.52	Aruba 2540-48G	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.53	Aruba S1500-48P	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	DC LKPP - internet utama	Aruba OS	SMKI
05.54	Aruba 2540-48G	Access Switch	Switch L2	RAI.03.01.03 Perangkat	DC LKPP -	Aruba OS	SMKI

ID (LKPP- DAI)	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Faskom	Perangkat Lunak Platform	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
				Keras Jaringan	internet utama		
05.55	Arista 7010T-48			RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan			
05.56	Allied Telesis x510-52GTX			RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan			
05.57	Allied Telesis AT-X550-18XTQ			RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan			
05.58	Allied Telesis AT-X550-18XTQ			RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan			

ID (LKPP- DAI)	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Faskom	Perangkat Lunak Platform	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
05.59	Arista 7010T-48			RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan			
05.60	Allied Telesis AT-XS916MXS			RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan			
05.61	Catalyst 2960G 24 GigE			RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan			
05.62	Cisco Nexus 2348TQ			RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan			
05.63	Flex Fabric 2940 Switch JH396A			RAI.03.01.03 Perangkat			

ID (LKPP- DAI)	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Faskom	Perangkat Lunak Platform	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
				Keras Jaringan			
05.64	Flex Fabric 2940 Switch JH396A			RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan			
05.65	ALLIED TELESIS ATX950-28XSQ			RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan			
05.66	ARISTA 7010T- 48			RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan			
05.67	Brocade VDX 6740			RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan			

ID (LKPP- DAI)	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Faskom	Perangkat Lunak Platform	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
05.68	Brocade VDX 6740			RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan			
05.69	Brocade 6520			RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan			
05.70	Brocade 6520			RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan			
05.71	Catalyst 3659 48 AX10G			RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan			
05.72	Catalyst 3659 48 AX10G			RAI.03.01.03 Perangkat			

ID (LKPP- DAI)	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Faskom	Perangkat Lunak Platform	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
				Keras Jaringan			
05.73	Cisco Nexus 2348TQ			RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan			
05.74	Cyberoam CR 300iNG-XP			RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan			

Tabel III.17 Infrastruktur Keamanan

ID (LKPP -DAI)	Nama Perangkat Keamanan	Deskripsi Security Device	→ Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	→ FasKom	→ Perangkat Keras Jaringan	→ Standar Teknis dan Prosedur Keamanan	→ Perangkat Lunak Platform
06.01	Fortiweb-400D	perangkat yang berfungsi dalam menunjang sistem keamanan pada web server / layer aplikasi.	RAI.03.01.04 Perangkat Keras Keamanan	DC LKPP - internet utama	Core Swicth	Perban BSSN 4 Tahun 2021 dan SMKI	Forti OS
06.02	Fortigate-601E	merupakan perangkat yang berfungsi untuk menunjang fungsi keamanan pada layer network.	RAI.03.01.04 Perangkat Keras Keamanan	DC LKPP - internet utama	Core Swicth	Perban BSSN 4 Tahun 2021 dan SMKI	Forti OS
06.03	Fortianalyzer 800G	perangkat berfungsi sebagai analitik dan otomasi dalam menghadapi dan menanggapi resiko	RAI.03.01.04 Perangkat Keras Keamanan	DC LKPP - internet utama	Core Swicth	Perban BSSN 4 Tahun 2021 dan SMKI	Forti OS

ID (LKPP -DAI)	Nama Perangkat Keamanan	Deskripsi Security Device	→ Referensi Arsitektur Infrastrukt ur (RAI)	→ FasKom	→ Perangkat Keras Jaringan	→ Standar Teknis dan Prosedur Keamanan	→ Perangka t Lunak Platform
		serangan siber dengan menggunakan sumber dari log perangkat fortimail, fortiweb dan fortigate.					
06.04	F5 BIG-IP i7000		RAI.03.01.04 Perangkat Keras Keamanan	Colocation Data Center DCI - Internet Primary			
06.05	Paloalto PA-3060		RAI.03.01.04 Perangkat Keras Keamanan	Colocation Data Center DCI - Internet Primary			
06.06	Fortinet Fortiget 601E		RAI.03.01.04 Perangkat	Colocation Data Center DCI			

ID (LKPP -DAI)	Nama Perangkat Keamanan	Deskripsi Security Device	→ Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	→ FasKom	→ Perangkat Keras Jaringan	→ Standar Teknis dan Prosedur Keamanan	→ Perangka t Lunak Platform
			Keras Keamanan	- Internet Primary			

Tabel III.18 Infrastruktur Hardware Periferal

ID (LKPP- DAI)	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Perangkat Keras Media Penyimpan	Perangkat Lunak Platform	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan	Audit Keamanan
07.01	PC	perangkat komputasi yang digunakan untuk pengembangan aplikasi dan pengolahan data	RAI.03.01.05 Peripheral	SSD, Hardisk	Microsoft Office365	SMKI LKPP	Audit TIK 2019
07.02	Laptop	perangkat komputasi yang digunakan untuk pengembangan aplikasi dan pengolahan data	RAI.03.01.05 Peripheral	SSD, Hardisk	Microsoft Office366	SMKI LKPP	Audit TIK 2020
07.03	Printer	perangakt eksternal komputer untuk proses pencetakan berkas	RAI.03.01.05 Peripheral	-	-	SMKI LKPP	Audit TIK 2021
07.04	External Storage	perangkat untuk penyimpanan atau back up data personal	RAI.03.01.05 Peripheral	Hardisk External	-	SMKI LKPP	Audit TIK 2022
07.05	Scanner	perangkat eksternal untuk scan berkas	RAI.03.01.05 Peripheral	-	-	SMKI LKPP	Audit TIK 2023

Tabel III.19 Infratraktur Intera Pemerintah

ID (LKPP-DAI)	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Sistem Penghubung Layanan	Data dan Informasi	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
08.01	Jaringan Pusat Data Nasional (PDNS)	Layanan jaringan PDNS	RAI.02.01 jaringan Intra Pemerintah	-	- Data dan Informasi Monitoring Anggaran - Data dan Informasi Kinerja Penyedia	SMKI dan Perban BSSN 4 tahun 2021
08.02	Internet Internasional	layanan internet utama LKPP	RAI.02.01 jaringan Intra Pemerintah	-	- Data dan Informasi Perkantoran - Data dan Informasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa - Data dan Informasi Hukum	SMKI
08.03	Internet Dedicated Internasional	layanan internet backup LKPP	RAI.02.01 jaringan Intra Pemerintah	-	- Data dan Informasi Perkantoran - Data dan Informasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa - Data dan Informasi Hukum	SMKI
	Internet Dedicated	Layanan Metro- E	RAI.02.01 jaringan Intra Pemerintah			

Tabel III.20 Sistem Penghubung Layanan

ID (LKPP-DAI)	Nama Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Deskripsi Sistem Penghubung	Jaringan Intra Pemerintah	Aplikasi	Data dan Informasi	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
09.01	ISB LKPP	Aplikasi untuk mengelola layanan pertukaran data berbasis web service yang dikembangkan oleh Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan	Jaringan Internal LKPP	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	Data dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	RAI.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah	SMKI LKPP
09.02	API Eksternal	Aplikasi untuk mengelola layanan pertukaran data berbasis web service yang dikembangkan oleh Pusdatin LKPP	Jaringan Internal LKPP	Aplikasi E-Office	Data dan Informasi Perkantoran	RAI.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah	SMKI LKPP

Tabel III.21 Infratraktur Fasilitas Komputer

ID (LKPP-DAI)	Nama Fasilitas Komputasi	Bandwidth Intranet	Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan	Penanganan Insiden Keamanan	Audit Keamanan SPBE
10.01	DC LKPP - internet utama	300 Mbps	RAI.01.03.02 Ruang Server Farm	SMKI LKPP	- Penanganan Insiden Aplikasi EOffice - Digital Forensik Aplikasi E-Office LKPP - Penanganan Insiden Aplikasi Pengaduan - Digital Forensik Aplikasi Pengaduan	CSM
10.02	DC LKPP - internet backup	200 Mbps	RAI.01.03.02 Ruang Server Farm	SMKI LKPP	-	CSM
	Colocation Data Center DCI - Internet Primary		RAI.01.03.02 Ruang Server Farm			
	Colocation Data Center DCI - Internet Secondary		RAI.01.03.02 Ruang Server Farm			

2. Analisis Gap Arsitektur Infrastruktur

Tabel III.22 Analisis Gap Arsitektur Infrastruktur

Area	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	Gap	Rencana Tindakan
Infrastruktur Awan (Cloud)	Pada saat ini LKPP sudah menerapkan konsep komputasi awan menggunakan konsep <i>Infrastructure as a Service</i> (IaaS) dengan menggunakan layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika	Mengoptimalkan pemanfaatan PDNS untuk hosting aplikasi – aplikasi yang dikelola oleh LKPP	Belum disusunnya roadmap dan timeline untuk migrasi aplikasi dari data center LKPP ke PDNS	Menyusun roadmap dan timeline untuk migrasi aplikasi dari data center LKPP ke PDNS
Infrastruktur Hardware Platform	LKPP telah memiliki beberapa perangkat lunak platform yang digunakan	Selain untuk mendukung proses bisnis dan layanan, perlu juga adanya perangkat lunak platform yang mendukung	Belum tersedianya perangkat lunak platform yang mendukung sistem	Penyediaan perangkat lunak yang mendukung sistem keamanan informasi untuk kegiatan vulnerability

Area	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	Gap	Rencana Tindakan
	<p>untuk mendukung proses bisnis dan layanan yang dapat diakses dengan mayoritas menggunakan teknologi web, dan juga dapat diakses secara mobile</p>	<p>keamanan informasi</p>	<p>keamanan informasi khususnya pada proses identifikasi dan monitoring.</p>	<p>assessment dan penetration testing</p>
<p>Infrastruktur Hardware Server</p>	<p>Perangkat keras server di LKPP di rancang untuk dapat menerapkan sistem virtualisasi serta dikelola oleh internal untuk mendukung kinerja aplikasi yang berjalan di LKPP</p>	<p>Seluruh perangkat server sudah menggunakan sistem clustering untuk menghasilkan suatu sistem dengan tingkat reabilitas, availability, dan performa tinggi.</p>	<p>Belum terlaksananya konsep clustering pada perangkat keras server.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penambahan dan peremajaan memory untuk meningkatkan performa server • Dikarenakan untuk penerapan clustering dibutuhkan pengadaan server baru, maka mulai beralih ke pemanfaatan infrastruktur

Area	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	Gap	Rencana Tindakan
				PDNS dikarenakan adanya proses clearance untuk pengadaan server
Infrastruktur Hardware Media Penyimpanan	LKPP memiliki perangkat keras media penyimpanan dengan kapasitas yang cukup besar untuk mendukung operasional yang dijalankan.	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki perangkat keras media penyimpanan dengan kapasitas yang cukup untuk mendukung operasional yang dijalankan. • Memiliki perangkat keras media penyimpanan dengan kapasitas yang cukup untuk mendukung pengembangan sistem dan pengelolaan data. 	Belum tercukupinya kapasitas perangkat keras media penyimpanan untuk mendukung pengembangan sistem dan pengelolaan data	Memanfaatkan media penyimpanan pada PDNS untuk pengembangan sistem dan pengelolaan data

Area	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	Gap	Rencana Tindakan
Infrastruktur Hardware Jaringan	Pada perangkat keras jaringan telah menggunakan perangkat memadai yang memungkinkan kinerja maksimal dalam mendukung konektivitas operasional di LKPP dengan mengacu pada aspek keamanan, ketersediaan, pertukaran data, dll.	perangkat keras jaringan telah menggunakan perangkat memadai yang memungkinkan kinerja maksimal dalam mendukung konektivitas operasional di LKPP dengan mengacu pada aspek keamanan, ketersediaan, pertukaran data, dll baik untuk jaringan LAN maupun jaringan wireless	Perlu adanya peningkatan jangkauan jaringan wireless agar dapat dimanfaatkan secara optimal di seluruh area gedung LKPP	Peningkatan jangkauan jaringan wireless dengan penambahan perangkat access point pada beberapa lokasi yang belum mendapatkan sinyal wirelees secara optimal.
Infrastruktur Keamanan	Pada perangkat keras keamanan telah menggunakan beberapa teknologi untuk berbagai fungsi (firewall, keamanan, VPN, dan	Selain memanfaatkan teknologi yang berfungsi untuk firewall, keamanan, VPN, dan pengendalian jaringan perlu juga adanya fungsi sanbox pada perangkat keamanan untuk	Belum terdapat perangkat keamanan yang berfungsi untuk memastikan tidak adanya malware pada setiap file yang diupload ke sistem LKPP	Melakukan penambahan perangkat keamanan sebagai sandbox yang berfungsi untuk memeriksa setiap file yang diupload ke sistem LKPP

Area	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	Gap	Rencana Tindakan
	pengendalian jaringan)	memastikan tidak terdapat malware pada setiap file yang diupload ke sistem LKPP		
Infrastruktur Hardware Peripheral	Sudah terdapat perangkat peripheral yang untuk mendukung operasional infrastruktur teknologi dan informasi di LKPP	Perangkat peripheral yang digunakan harus memiliki performa dan availability yang tinggi guna mengoptimalkan kegiatan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di LKPP	Perangkat peripheral saat ini memiliki performa dan availability yang kurang baik, karena sudah berumur lebih dari 5 tahun.	Melakukan peremajaan perangkat peripheral guna mengoptimalkan kegiatan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di LKPP
Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah	Saat ini belum terdapat adanya jaringan intra pemerintah di LKPP	Terdapat jaringan intra pemerintah untuk mendukung konektivitas dan integrasi layanan dengan K/L/P/D lain	Belum terdapat adanya jaringan intra pemerintah di LKPP	Menerapkan teknologi jaringan intra pemerintah
Infrastruktur Sistem Penghubung Layanan	Infrastruktur sistem penghubung layanan di LKPP belum maksimal	Terdapat infrastruktur penghubung layanan pemerintah untuk mendukung	Infrastruktur penghubung layanan pemerintah saat ini berada dalam	Membangun infrastruktur penghubung layanan pada <i>environment production</i>

Area	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	Gap	Rencana Tindakan
	digunakan karena masih dalam pembangunan environment development	integrasi antar layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	<i>environment development</i> sehingga pertukaran data pemerintah belum dapat dilakukan	sehingga proses pertukaran data antar pemerintah dapat dilaksanakan secara optimal
Infrastruktur Fasilitas Komputer	LKPP telah memiliki data center sejak tahun 2015 dengan fasilitas yang cukup memadai untuk mendukung operasional sistem informasi	Seluruh fasilitas yang ada pada data center LKPP dapat berfungsi dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> • PAC pada data center sudah mengalami penurunan performa • Beberapa CCTV yang digunakan untuk monitoring aktifitas fisik di data center sudah rusak • Fingerprint yang digunakan untuk akses masuk data center 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penggantian perangkat PAC • Melakukan penggantian CCTV yang rusak • Mengganti sistem fingerprint akses data center yang telah rusak • Melakukan peremajaan baterai UPS data center

Area	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	Gap	Rencana Tindakan
			sudah rusak • Baterai UPS pada data center kondisinya sudah usang	

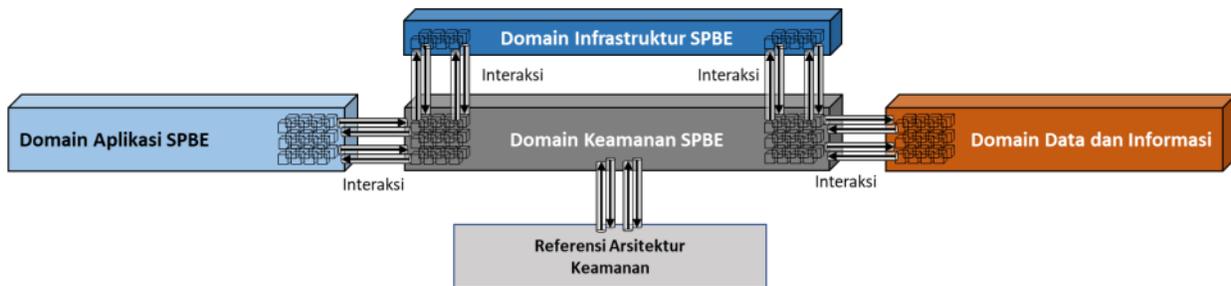
F. Arsitektur Keamanan

Domain arsitektur keamanan SPBE bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian dan pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pertimbangan kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif.

Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non-repudiational* sumber daya terkait data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan. Kerangka kerja arsitektur keamanan SPBE terdiri atas referensi arsitektur keamanan SPBE dan domain keamanan SPBE.

1. Arsitektur Keamanan Eksisting

Domain arsitektur keamanan SPBE adalah domain arsitektur yang mendeskripsikan kerangka dasar keamanan terkait data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Relasi domain arsitektur keamanan SPBE menyatakan hubungan dengan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur aplikasi SPBE, dan domain arsitektur infrastruktur SPBE, maka dapat terlihat relasi langsung pada Gambar III.19.



Gambar III.9 Relasi langsung pada Domain Keamanan SPBE

Berdasarkan penjelasan di atas, domain Keamanan SPBE eksisting dapat dilihat pada Tabel III.23 sampai Tabel III.29.

Tabel III.23 Standar Keamanan

ID (LKPP-DAK)	Nama	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	Instansi
01.01	UU No. 27 Tahun 2022	Standar Nasional dan/atau Peraturan Terkait Teknis dan Prosedur	Undang-Undang tentang perlindungan data pribadi	17 Oktober 2022	sekarang	Setneg RI

ID (LKPP- DAK)	Nama	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	Instansi
		Keamanan SPBE				
01.02	Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022	Standar Nasional dan/atau Peraturan Terkait Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Arsitektur Sistem Pemerintah n Berbasis Elektronik Nasional	20 Desember 2022	sekarang	Setneg RI
01.03	Peraturan Presiden No. 82 Tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital	Standar Nasional dan/atau Peraturan Terkait Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital	24 Mei 2022	sekarang	Setneg RI
01.04	Keputusan Kepala LKPP	Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Keputusan Kepala LKPP sebagai pedoman dalam rangka melindungi aset informasi	on proses	on proses (tahap paraf koordinasi KEPKA SMKI)	LKPP

ID (LKPP- DAK)	Nama	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	Instansi
			Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dari berbagai bentuk ancaman baik internal maupun eksternal			
01.05	Keputusa n Kepala LKPP No. 145 Tahun 2022	Regulasi lain	Keputusan Kepala LKPP tentang pedoman penyelenggar aan sistem pemerintaha n berbasis elektronik di lingkungan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	2 Juni 2022	sekarang	LKPP
01.06	Peraturan BSSN Nomor	Standar Nasional dan/atau Peraturan	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara	21 Mei 2021	sekarang	BSSN

ID (LKPP- DAK)	Nama	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	Instansi
	4 Tahun 2021	Terkait Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
01.07	Kepmenp an RB Nomor 1148 Tahun 2021	Standar Nasional dan/atau Peraturan Terkait Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	6 Desember 2021	sekarang	MenPAN RB, BSSN, Kominfo , BRIN

Tabel III.24 Audit Keamanan

ID (LKPP- DAK)	Nama Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Hasil Audit Keamanan SPBE	Jenis Audit Keamanan	Tanggal Kegiatan Audit Keamanan	Instansi
02.01	Audit Keamanan Aplikasi Umum SPBE	- Pemahaman Desain Kendali - Evaluasi Desain Kendali - Evaluasi Implementasi Kendali -Evaluasi Efektivitas Kendali	Tidak Memadai	Eksternal dengan BSSN	14 Nov - 13 Desember 2022	BSSN
02.02	Audit CSM (Cyber Security Maturity)	Audit Pengelolaan Keamanan Siber yang dikoordinasikan oleh BSSN (Cyber Security Maturity)	Level 4 (3,91)	Eksternal oleh BSSN	19-22 Juni 2023	BSSN
02.03	Audit Keamanan TIK	Audit Keamanan dengan berdasarkan ISO 27001:2013 ruang lingkupnya	perlu peningkatan	Eksternal dengan penyedia	2019	

ID (LKPP- DAK)	Nama Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Hasil Audit Keamanan SPBE	Jenis Audit Keamanan	Tanggal Kegiatan Audit Keamanan	Instansi
		adalah Bagian Sistem Informasi				
02.04	Audit TMPI	Audit Tingkat Maturitas Penanganan Insiden Keamanan Siber	2.36	Eksternal dengan BSSN	14-Nov-22	BSSN

Tabel III.25 Edukasi Keamanan

ID (LKPP- DAK)	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Instansi
03.01	Sharing Knowledge Implementasi DevSecOps	berdiskusi dengan praktisi mengenai koordinasi antar tim Development dengan tim Operations dengan efektif dan efisien dan juga mengintegrasikan praktik keamanan ke dalam setiap fase DevOps sesuai dengan best practice di dunia teknologi informasi	Kamis 22 April 2021	LKPP
03.02	Security Awareness	Rapat Security Awareness	03 Mei 2021	LKPP
03.03	Security Awareness	Pelatihan Awareness dan Audit Internal ISO 27001:2013	14-Nov-22	LKPP
03.04	Pelatihan ISO 27001	Pelatihan Awareness dan Audit Internal ISO 27001:2013	15 - 18 November 2022	LKPP
03.05	Diskusi Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	Diskusi Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Sistem Pengadaan Barang/Jasa	Kamis, 3 November 2022	LKPP

ID (LKPP- DAK)	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Instansi
	tentang Perlindungan Data Pribadi pada Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	Pemerintah Secara Elektronik		
03.06	Pelatihan ISO 27001	Pelatihan Lead Auditor ISO 27001:2013 (IRCA Certified)	5 - 9 Desember 2022	LKPP
03.07	Security Awareness	TIK TALKS	18-Oct-23	LKPP
03.08	Bimbingan Teknis Admin System LPSE	Bimbingan teknis kepada pengelola LPSE dengan materi Backup dan Restore SPSE , Error handling SPSE, dan Keamanan Informasi SPSE	7 - 9 Maret 2023 9 - 11 Mei 2023 6 - 8 Juni 2023 4 - 6 Juli 2023 8 - 10 Agustus 2023 5 - 7 September 2023 3 - 5 Oktober 2023 14 - 16 November 2023	LKPP

ID (LKPP- DAK)	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Instansi
03.09	Peningkatan Kapasitas Admin System LPSE	Training Linux Red Hat Certified System Administration kepada pengelola LPSE	30 Oktober - 1 November 2023	LKPP

Tabel III.26 Identifikasi Kerentanan Keamanan

ID (LKPP- DAK)	Nama Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Instansi
04.01	IT Security Assessment (ITSA)	Kegiatan IT Security Assessment pada Aplikasi AMEL LKPP	4-8 April 2022	BSSN
04.02	IT Security Assessment (ITSA)	Kegiatan IT Security Assessment pada Aplikasi ISB LKPP	18-22 Juli 2022	BSSN
04.03	IT Security Assessment (ITSA)	Kegiatan IT Security Assessment pada Aplikasi SIKAP dan ADP LKPP	11-15 Juli 2022	BSSN
04.04	IT Security Assessment (ITSA)	Kegiatan IT Security Assessment pada Aplikasi eOffice LKPP	17-23 Agustus 2022	BSSN
04.05	IT Security Assessment (ITSA)	Kegiatan IT Security Assessment pada Aplikasi eOffice LKPP, JDIH, dan PPSDM	21 - 27 September 2023	BSSN

ID (LKPP- DAK)	Nama Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Instansi
04.06	IT Security Assessment (ITSA)	Kegiatan Satuan tugas dan Pelindungan Data, operasional sandi terkait IT Security Assessment pada aplikasi SIPRAJA	25 Oktober 2023	BSSN

Tabel III.27 Penanganan Keamanan

ID (LKPP- DAK)	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Nilai Kematangan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Instansi
05.01	Penanganan Insiden Aplikasi EOffice	Penanganan Insiden Aplikasi EOffice	29-Nov-22	-	LKPP
05.02	Digital Forensik Aplikasi E- Office LKPP	Digital Forensik Aplikasi E- Office LKPP	6 Januari 2023	-	BSSN
05.03	Penanganan Insiden Aplikasi Pengaduan	Penanganan Insiden Aplikasi Pengaduan	31 Mei 2023	-	LKPP
05.04	Digital Forensik Aplikasi Pengaduan	Digital Forensik Aplikasi Pengaduan	22 Juni 2023	-	BSSN
05.05	Penanganan Insiden Aplikasi Inaproc	Penanganan Insiden Aplikasi Inaproc	10 Januari 2023	-	LKPP
05.06	Digital Forensik Aplikasi Inaproc	Digital Forensik Aplikasi Inaproc	31 Mei 2023	-	BSSN

ID (LKPP- DAK)	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Nilai Kematangan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Instansi
05.07	Diskusi terkait Temuan Security dalam Aplikasi SIRUP	Diskusi terkait Temuan Security dalam Aplikasi SIRUP	15-Nov-22	-	LKPP

Tabel III.28 Peningkatan keamanan

ID (LKPP- DAK)	Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Instansi
06.01	Diskusi Tindak Lanjut Penanganan Insiden Keamanan Informasi pada Aplikasi Pengaduan LKPP	Diskusi Tindak Lanjut Penanganan Insiden Keamanan Informasi pada Aplikasi Pengaduan LKPP	22 Juni 2023	LKPP
06.02	Pembahasan Isu Keamanan Sistem Pengadaan Barang/Jasa dan Instalasi SPSE 4.5	Pembahasan Isu Keamanan Sistem Pengadaan Barang/Jasa dan Instalasi SPSE 4.5	05 Desember 2022	LKPP
06.03	Penyusunan Pedoman Security Operation Center (SoC)	Penyusunan Pedoman Security Operation Center (SoC)	21 Agustus - 6 Oktober 2023	LKPP
06.04	Kritikalitas Perangkat Server	Kritikalitas Perangkat Server	On Progress	LKPP
06.05	Patching email Zimbra	Patching email Zimbra	13 Oktober 2022	LKPP
06.06	Pembentukan dan Pengelolaan Security Operation Center (SoC)	Pembentukan dan Pengelolaan Security Operation Center (SoC)	2024	LKPP

ID (LKPP- DAK)	Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Instansi
06.07	Penggunaan Firewall	Penggunaan Appliance Cisco ASA dan Fortigate untuk mengontrol dan mengawasi paket data yang mengalir di jaringan	Tiap Tahun	LKPP
06.08	Penggunaan Web Application Firewall	Penggunaan Appliance Fortiweb dan Aplikasi untuk melindungi website dari cyber attack seperti cross-site-scripting (XSS), Distributed Denial-of-Service (DDoS), SQL injection, file inclusion, serta serangan lainnya.	Tiap Tahun	LKPP
06.09	Penggunaan Security Event Monitoring	Appliance FortiAnalyzer untuk monitoring serangan siber	Tiap Tahun	LKPP
06.10	Penggunaan Fingerprint akses dan CCTV	Penggunaan fingerprint akses dan CCTV untuk pengamanan ruang data center	Tiap Tahun	LKPP

ID (LKPP- DAK)	Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Instansi
06.11	Rapat Diskusi Teknis Keamanan Informasi	Diskusi Tindak Lanjut Penanganan Insiden Keamanan Informasi di LPSE DI Yogyakarta	26 Oktober 2023	LKPP
06.12	Rapat Hardening & Cleaning	Hardening & Cleaning pada server aplikasi SPSE Terdistribusi	21 Februari 2023, 14 Februari 2023,	LKPP
06.13	Monitoring Keamanan Informasi LPSE	pemeliharaan keamanan jaringan dan informasi, serta mengevaluasi perangkat dan sistem yang menunjang aplikasi SPSE.	2-4 Februari 2023	LKPP
06.14	diskusi pembahasan keamanan informasi sistem pengadaan secara elektronik dan instalasi SPSE 4.5	meningkatkan keamanan sistem informasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	7-9 Desember 2023	LKPP

Tabel III.29 Kelaikan Keamanan

ID (LKPP- DAK)	Nama Kegiatan Kelaikan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Kelaikan Keamanan SPBE	Tanggal Kelaikan Keamanan SPBE	Instansi
07.01	Performance Test (Stress Test / Load Test) Aplikasi	Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa aplikasi dapat menghandle transaksi sesuai dengan target	Dilaksanakan sebelum Aplikasi Naik Production	
07.02	Security Testing	Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan adalah aplikasi yang aman dari serangan siber (tidak menggunakan fungsi-fungsi atau kode yang tidak aman)	Dilaksanakan sebelum Aplikasi Naik Production	

2. Analisis Gap Arsitektur Keamanan

Tabel III.30 Analisis Gap arsitektur Keamanan

Area	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	Gap	Rencana Tindakan
Audit TIK	Saat ini LKPP tidak dapat melakukan Audit TIK Internal karena belum memiliki Pedoman Penyelenggaraan Audit TIK atas SPBE di lingkungan LKPP	LKPP dapat melakukan Audit TIK Internal yang sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Audit TIK atas SPBE di lingkungan LKPP	Belum disusun dan ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Audit TIK atas SPBE di lingkungan LKPP	Menyusun dan Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Audit TIK atas SPBE di lingkungan LKPP

BAB IV PETA RENCANA

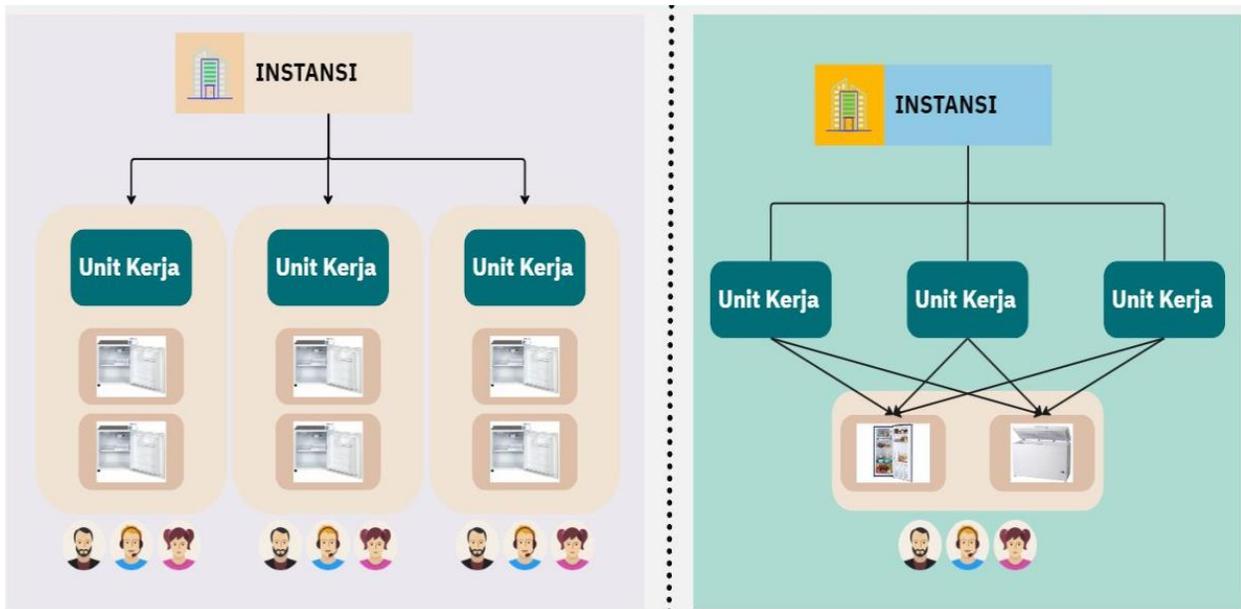
Dalam rangka mencapai keterpaduan layanan digital nasional, Pemerintah melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, mengidentifikasi layanan SPBE Prioritas dengan pondasi *Digital Public Infrastructure* dengan kanal layanan berupa Portal Nasional (Portal pelayanan publik dan Portal Administrasi Pemerintahan). Sejalan dengan ini, LKPP perlu juga melakukan percepatan transformasi digital dengan menyediakan layanan melalui portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan. LKPP juga berperan untuk memastikan percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digitalnya, dengan melakukan:

1. *User centric* dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Penyederhanaan proses bisnis.
3. Konsolidasi seluruh aplikasi SPBE ke dalam 1 (satu) portal layanan publik sebagai transisi konsolidasi ke dalam portal layanan nasional, yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional.
4. Memastikan keterpaduan rencana dan anggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE.
5. Meningkatkan keterpaduan layanan lintas sektor dan institusi.
6. Manajemen data yang menjamin integritas dan konsistensi data.

A. *User Centric*

Selama ini layanan yang diberikan kepada masyarakat diturunkan berdasarkan tugas dan fungsi dari susunan organisasi tata kerja (SOTK). Proses bisnis dibuat berdasarkan tugas dan fungsi organisasi, dari setiap proses bisnis yang dibuat akan memiliki output yaitu layanan. Metode seperti ini berpotensi menghasilkan duplikasi layanan, dimana masing-masing unit kerja mungkin bisa memiliki proses bisnis dan layanan yang sama/sejenis.

Hal ini dapat di dihindari dengan cara memberikan pelayanan yang berfokus pada user. Berdasarkan pelayanan yang diberikan tersebut kemudian ditentukan langkah-langkah yang dilakukan untuk memberikan layanan tersebut, yaitu proses bisnis. Kemudian, menentukan alokasi unit kerja pada setiap proses/subproses bisnis yang ada dalam rangka memenuhi pelayanan. Penerapan metode ini diharapkan dapat meminimal kan resiko duplikasi, seperti terlihat pada Gambar IV.1.



Gambar IV.1 Dari Fungsi Unit Kerja ke Layanan

B. Penyederhanaan Proses Bisnis

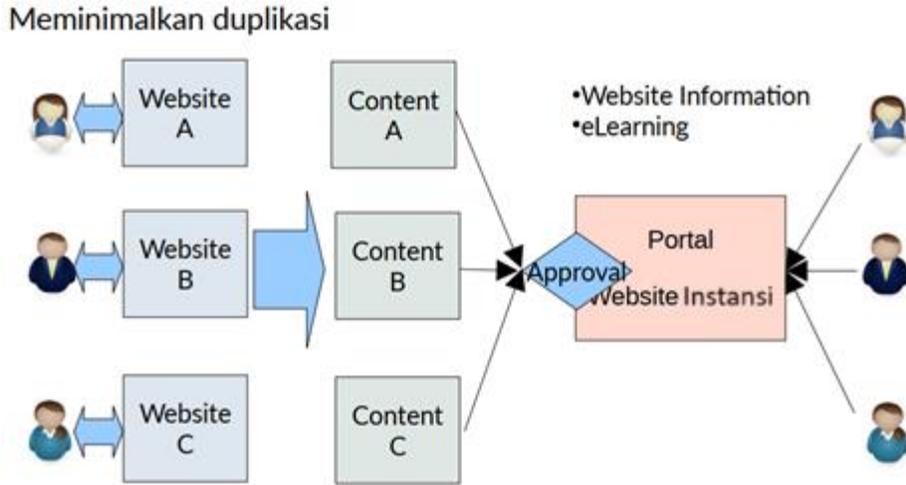
Agar penyederhanaan proses bisnis dapat menghasilkan proses bisnis yang efektif dan efisien, maka inovasi proses bisnis dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal berikut:

1. Layanan berbasis elektronik
2. Modularitas

Penyederhanaan proses mengutamakan pemberian layanan berbasis elektronik agar waktu layanan dapat dilakukan lebih cepat, akurat dan transparan. User centric dapat meminimalkan duplikasi pada layanan. Sedangkan modularitas dapat meminimalkan duplikasi proses bisnis. Cara yang dilakukan adalah dengan memilah proses bisnis ke bagian yang lebih kecil dan meminimalkan duplikasi proses bisnis pada level tertentu.

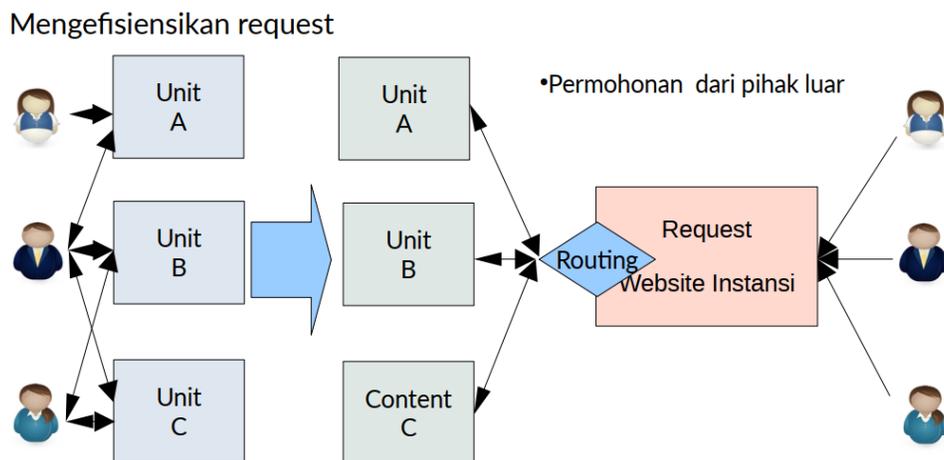
Beberapa contoh penyederhanaan proses bisnis yang direncanakan akan dilakukan agar proses bisnis menjadi lebih *agile*, seperti penyederhanaan pengelolaan website, pengelolaan permintaan layanan, pengelolaan data.

Salah satu contoh penyederhanaan proses bisnis adalah pengelolaan website instansi yang memberikan informasi publik. Masing-masing unit kerja memiliki website yang dikelola secara independen dalam mendukung tugas dan fungsi unit tersebut dalam memberikan layanannya. Penyederhanaan dapat dilakukan dengan cara, pengelolaan website dilakukan lewat 1 (satu) pintu, termasuk persetujuan konten dan sistem. Sedangkan konten diberikan oleh masing-masing unit sesuai tugas dan fungsinya. Seperti terlihat pada Gambar IV.2.



Gambar IV.2 Pengelolaan Konten

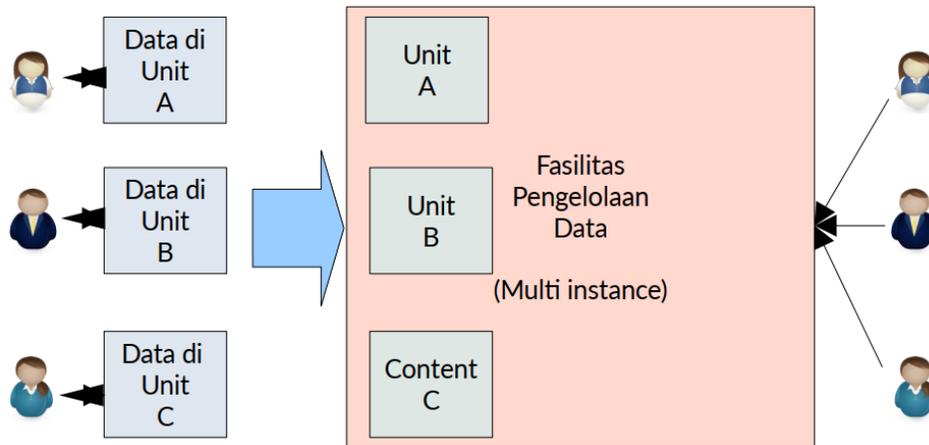
Pengelolaan permintaan layanan juga dapat disederhanakan. Setiap permintaan pelayanan yang selama ini dilakukan langsung ke masing-masing unit kerja secara independen, dapat dikelola lewat 1 pintu. Setiap permintaan pelayanan ditujukan ke instansi, kemudian instansi akan meneruskan permintaan layanan tersebut ke unit terkait, begitu juga sebaliknya untuk memberikan permintaan layanan yang diberikan, seperti terlihat pada Gambar IV.3.



Gambar IV.3 Pengelolaan Permintaan Layanan

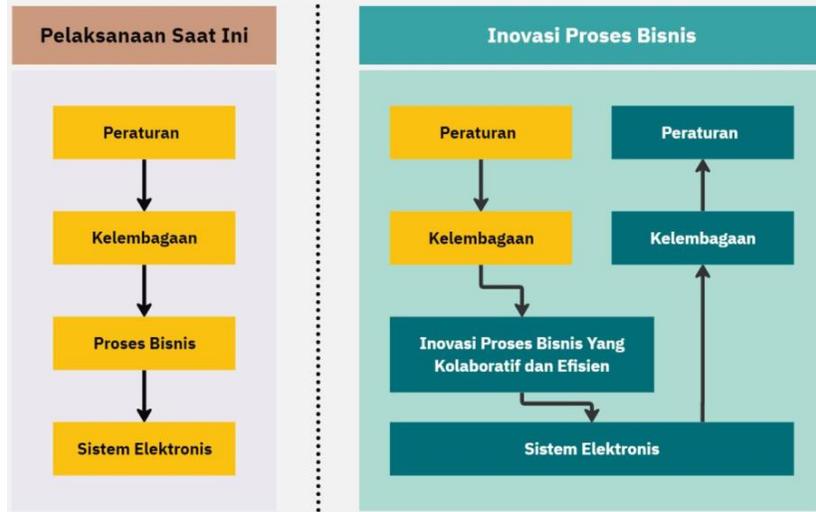
Pengelolaan data yang selama ini dilakukan oleh masing-masing unit terkait dengan tugas dan fungsinya. Penyederhanaan dapat dilakukan dengan meletakkan seluruh data instansi pada fasilitas pengelolaan data, dan pengelolaan data tetap dapat dilakukan oleh masing-masing unit terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti terlihat pada Gambar IV.4.

Mengefisiensikan pengelolaan data



Gambar IV.4 Pengelolaan Data

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, maka menjadikan metode pengembangan proses bisnis yang biasanya dilakukan secara *top down*, mulai dari kebijakan sampai ke sistem elektronik yang dibuat (aplikasi), menjadi kurang relevan lagi. Oleh karena itu, pengembangan proses bisnis yang dilakukan, selain *top down*, juga akan menerapkan metode *bottom up*, mulai dari pemberian layanan menggunakan sistem elektronik kemudian pada akhirnya akan menghasilkan kebijakan. Seperti terlihat pada Gambar IV.5 Inovasi Proses Bisnis.



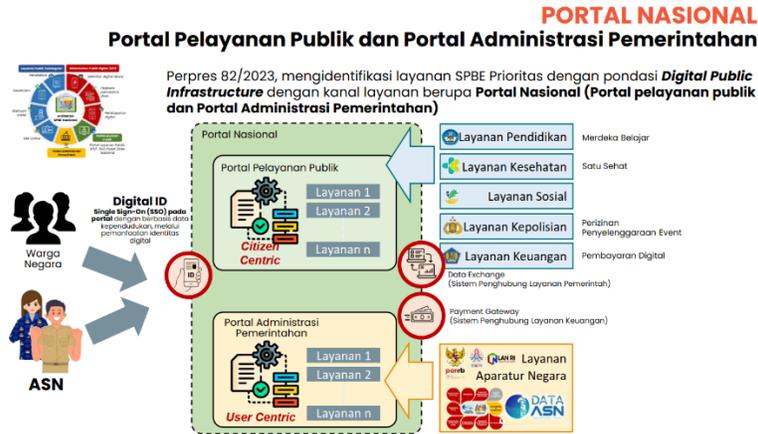
Gambar IV.5 Inovasi Proses Bisnis

Peta Rencana SPBE merupakan penjabaran dari proses perencanaan penyelenggaraan SPBE IPPD melalui serangkaian program dan/atau kegiatan yang akan dilakukan beserta indikator pencapaian target dan penanggung jawab target tersebut sehingga penyelenggaraan SPBE menjadi terarah dan terpadu.

Peta rencana SPBE LKPP dibuat berdasarkan pada keselarasan dengan Arsitektur SPBE Nasional

C. Satu Portal Layanan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023, layanan SPBE Prioritas dengan pondasi *Digital Public Infrastructure* dengan kanal layanan berupa Portal Nasional (Portal pelayanan publik dan Portal Administrasi Pemerintahan), seperti terlihat pada Gambar IV.6 Portal Nasional.



Gambar IV.6 Portal Nasional

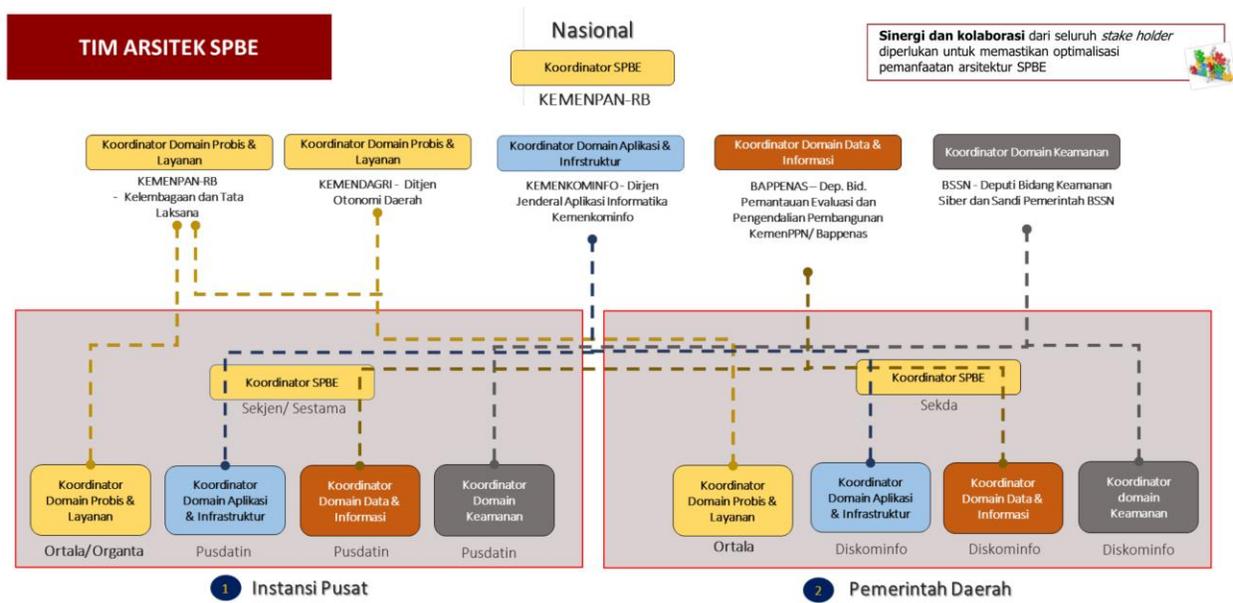
Sejalan dengan itu, transisi yang dilakukan oleh LKPP juga mengarah ke layanan yang terintegrasi lewat dua kanal, yaitu portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan.

D. Keterpaduan SPBE

Pembangunan SPBE merupakan tanggung jawab bersama semua unit yang ada di LKPP. Keterpaduan SPBE merupakan aspek penting dalam mendukung terkelolanya SPBE dengan baik, keterpaduan prioritas yang jadi fokus utama adalah:

1. Keterpaduan rencana dan anggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE ,
2. Keterpaduan layanan lintas sektor dan institusi

Berdasarkan SPBE Nasional, Koordinator Domain SPBE pada instansi pusat berupa pada Unit Ortable dan Pusdatin, seperti terlihat pada Gambar IV.7 Koordinator SPBE. Pada LKPP, koordinasi Domain Proses bisnis dan Layanan ada pada Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia (BHOSDM). Sedangkan, tiga domain lain yaitu domain Aplikasi dan Infrastruktur, domain Data dan Informasi dan domain Keamanan di bawah koordinasi Pusdatin. Dalam hal keterpaduan SPBE, keterpaduan rencana dan anggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE dikoordinasi oleh Pusdatin. Keterpaduan layanan lintas sektor dan institusi dikoordinasi oleh BHOSDM.



Gambar IV.7 Koordinator SPBE

E. Integritas dan Konsistensi Data

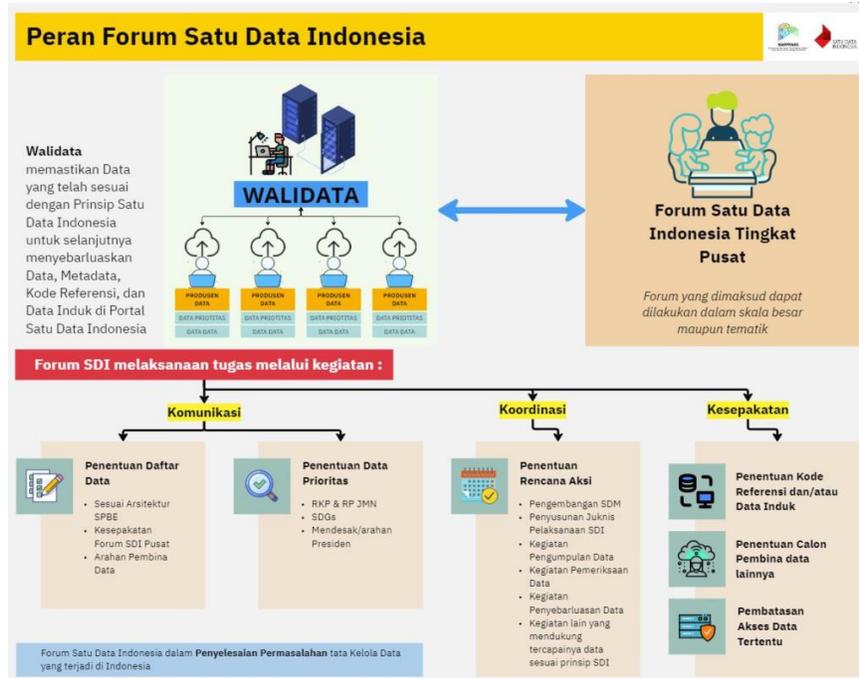
Dalam rangka mendukung percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia, yaitu terwujudnya kolaborasi dan sinergi antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Aspek kelembagaan yang harus menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Pembina Data yang melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan menetapkan Standar dan Metadata.
2. Walidata di tingkat pusat dan daerah, serta Walidata Pendukung di tingkat daerah. Walidata memastikan bahwa setiap informasi yang disebarluaskan antar instansi telah diperiksa sesuai prinsip Satu Data Indonesia melalui mekanisme *one gate policy*.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data telah memenuhi kaidah interoperabilitas dan dapat dengan mudah dibagi-pakaikan antar instansi.

Sejalan dengan sinergi internal, penguatan lintas instansi dilakukan dengan adanya Forum Satu Data Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Forum Satu Data Indonesia merupakan wadah yang menampung gagasan dan pembahasan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta

penyelesaian permasalahan terkait data. Forum juga bertugas untuk membahas dan menetapkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia, seperti terlihat pada Gambar IV.8 Forum Satu Data Indonesia.



Gambar IV.8 Forum Satu Data Indonesia

F. Perubahan Peran Pengelola SPSE dan eKatalog

Sejalan dengan pengalihan pengelolaan SPSE dan e-Katalog pada Telkom, lihat Gambar IV.9, maka terjadi perubahan tanggung jawab. LKPP sebagai pemilik Produk memiliki tanggung jawab untuk menentukan kriteria kekritisan sistem dan memastikan bahwa kriteria tersebut dapat dipenuhi oleh pengelola, dalam hal ini, Telkom. Tugas yang perlu dilakukan LKPP, secara garis besar, adalah:

1. Menentukan kriteria kekritisan, seperti menentukan business impact dan menentukan tingkat kekritisan yang harus dipenuhi
2. Menentukan transparansi kekritisan sistem, seperti:
 - Metoda pengembangan sistem yang dilakukan
 - Metode pengukuran kinerja yang diterapkan
 - Spesifikasi non functional dan functional sistem

- Dokumentasi yang perlu diserahkan oleh pengelola
- Mekanisme pemantauan dan evaluasi (Tauval) sesuai kekritisan sistem

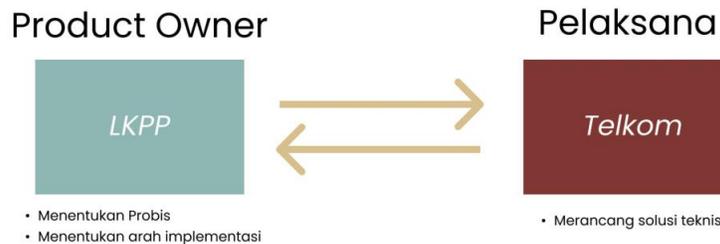
Sedangkan tugas pelaksana, dalam hal ini Telkom adalah:

1. Proses pembangunan sistem, yang meliputi:

- Menerapkan metoda yang dibakukan pada pengembangan sistem
- Menghasilkan artefak sesuai spesifikasi
- Membuat dokumentasi pengembangan sesuai permintaan LKPP

2. Menyediakan data dan akses untuk proses Tauval, seperti:

- Memberikan akses agar dapat memonitor pengawasan secara detail sistem yang bekerja (*grey box*)
- Memberikan hasil pengukuran sesuai tingkat pengukuran yang ditentukan.



Gambar IV.9 Pergeseran Peran LKPP-Telkom

G. Peta Rencana

Tabel IV.1 Peta Rencana

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target
				2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ					
Indikator	Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K				40%
	Persentase realisasi belanja pengadaan PDN				80%
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE LKPP: Layanan PBJ berbasis elektronik Terintegrasi					
1	Tata Kelola SPBE				
	A	Peningkatan akses UMK pada PBJ			
		-	Penyusunan Kebijakan yang mendorong semakin baiknya indeks sebaran pelaku UMK pada PBJ (terdaftar dalam SPSE dan e-catalogue)		
		-	Pemantauan dan evaluasi pencapaian indeks sebaran pelaku UMK		
	B	Peningkatan Jumlah PDN dan Produk UMK-K dalam PBJ			
		-	Penyusunan kebijakan yang mendorong ketersediaan PDN untuk PBJ, khususnya yang terdaftar pada marketplace (katalog elektronik)		
		-	Pemantauan dan evaluasi pencapaian ketersediaan PDN untuk PBJ (Katalog Elektronik)		
	C	Peningkatan K/L/Pemda yang membelanjakan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ			
		-	Penyusunan Kebijakan yang mendorong pembelanjaan anggaran belanja		

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target
				2023	2024
		pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ			
		- Pemantauan dan evaluasi pencapaian target pembelanjaan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ			
2	Manajemen SPBE				
	A	Peningkatan akses UMK pada PBJ			
		- Koordinasi percepatan peningkatan akses pelaku UMK ke ekosistem PBJ berbasis elektronik (SPSE, e-Catalogue, BISA, toko daring)			
		- Memberikan Pendampingan akses UMK ke PBJ berbasis elektronik baik luring maupun daring			
		- Monitoring dan evaluasi akses pelaku UMK ke ekosistem PBJ berbasis elektronik			
	B	Peningkatan Jumlah PDN dan Produk UMK-K dalam PBJ			
		- Koordinasi percepatan peningkatan Jumlah PDN dan Produk UMK-K dalam PBJ			
		- Melakukan verifikasi PDN dan produk UMK-K dalam PBJ (e-katalog)			
		- Monitoring dan evaluasi PDN dan Produk UMK-K dalam PBJ			
	C	Peningkatan K/L/Pemda yang membelanjakan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ			

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target
				2023	2024
	-	Koordinasi pembelanjaan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ			
	-	Memfasilitasi kemudahan pembelanjaan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ			
	-	Monitoring dan evaluasi pembelanjaan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ			
3	Layanan SPBE				
	A	Peningkatan akses UMK pada PBJ			
	-	Memberikan kemudahan layanan elektronik terintegrasi yang handal			
	B	Peningkatan Jumlah PDN dan Produk UMK-K dalam PBJ			
	-	Memberikan kemudahan layanan elektronik terintegrasi yang handal			
	C	Peningkatan K/L/Pemda yang membelanjakan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ			
	-	Memberikan kemudahan layanan elektronik terintegrasi yang handal			
4	Aplikasi SPBE				
	A	Peningkatan akses UMK pada PBJ			
	-	Memfasilitasi pencapaian indeks sebaran pelaku dapat diinformasikan secara secara elektronik dan realtime			
	B	Peningkatan Jumlah PDN dan Produk UMK-K dalam PBJ			

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target
				2023	2024
	-	Memfasilitasi pencapaian persentase jumlah PDN dan produk UMK-K dapat diinformasikan secara elektronik dan realtime			
	C	Peningkatan K/L/Pemda yang membelanjakan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ			
	-	Memfasilitasi pencapaian presentase Realisasi Belanja Pengadaan PDN dan produk UMK-K dapat diinformasikan secara elektronik dan realtime			
5	Infrastruktur SPBE				
	A	Peningkatan akses UMK pada PBJ			
	-	Memelihara infrastruktur SPBE untuk menjaga kualitas sesuai standar layanan			
	B	Peningkatan Jumlah PDN dan Produk UMK-K dalam PBJ			
	-	Memelihara infrastruktur SPBE untuk menjaga kualitas sesuai standar layanan			
	C	Peningkatan K/L/Pemda yang membelanjakan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ			
	-	Memelihara infrastruktur SPBE untuk menjaga kualitas sesuai standar layanan			
6	Keamanan SPBE				
	A	Peningkatan akses UMK pada PBJ			
	-	Memelihara keamanan SPBE untuk menjaga kualitas sesuai standar layanan			

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target
				2023	2024
	B	Peningkatan Jumlah PDN dan Produk UMK-K dalam PBJ			
		- Memelihara keamanan SPBE untuk menjaga kualitas sesuai standar layanan			
	C	Peningkatan K/L/Pemda yang membelanjakan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ			
		- Memelihara keamanan SPBE untuk menjaga kualitas sesuai standar layanan			
7	Audit TIK				
	A	Peningkatan akses UMK pada PBJ			
		- Audit TIK untuk menjaga kualitas sesuai standar layanan			
	B	Peningkatan Jumlah PDN dan Produk UMK-K dalam PBJ			
		- Audit TIK untuk menjaga kualitas sesuai standar layanan			
	C	Peningkatan K/L/Pemda yang membelanjakan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ			
		- Audit TIK untuk menjaga kualitas sesuai standar layanan			
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan					
Indikator	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"				155
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE LKPP: Layanan PBJ berbasis elektronik Terintegrasi					
1	Tata Kelola SPBE				
	A	Peningkatan kualitas implementasi regulasi PBJ			

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target
				2023	2024
		- Penyusunan pedoman survey berbasis elektronik			
	B	Peningkatan akuntabilitas proses pengadaan melalui sistem informasi pengadaan			
		- Penguatan kebijakan yang mendorong penggunaan SPSE dan penguatan sistem informasi PBJ terpusat			
		- Penyusunan kebijakan Pengembangan Sistem Digital PBJP terkait pengalihan pengembangan dan operasional Sistem PBJP			
		- Penyusunan Proses Bisnis Pengembangan Sistem Digital PBJP terkait pengalihan pengembangan dan operasional Sistem PBJP			
		- Penyusunan Pedoman Pengembangan Sistem Digital PBJP terkait pengalihan pengembangan dan operasional Sistem PBJP			
		- Pemantauan dan evaluasi penerapan tata kelola pengadaan			
	C	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan PBJ			
		- Penguatan kebijakan yang mendorong literasi SPBE, peningkatan kapasitas ASN penyelenggara SPBE dan kolaborasi SPBE			
	D	Meningkatnya efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan			
		- Penguatan kebijakan yang mendorong pemanfaatan sistem informasi dalam			

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target
				2023	2024
		pencatatan advokasi dan penyelesaian masalah			
		- Pemantauan dan evaluasi efektifitas advokasi dan penyelesaian masalah			
2	Manajemen SPBE				
	A	Peningkatan kualitas implementasi regulasi PBJ			
		- Melaksanakan survey secara elektronik			
		Menyimpan hasil survey pada sistem			
		- manajemen pengetahuan			
	B	Peningkatan akuntabilitas proses pengadaan melalui sistem informasi pengadaan			
		- Penerapan manajemen SPBE sesuai amanat Perpres SPBE			
	C	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan PBJ			
		- Penerapan manajemen SPBE khususnya kompetensi sumberdaya manusia			
	D	Meningkatnya efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan			
		- Penerapan manajemen SPBE dalam menentukan efektivitas advokasi dan penyelesaian masalah pengadaan			
3	Layanan SPBE				
	A	Peningkatan kualitas implementasi regulasi PBJ			
		- Layanan diberikan melalui portal layanan publik yang terintegrasi dengan menerapkan manajemen layanan berdasarkan pedoman			

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target
				2023	2024
	B	Peningkatan akuntabilitas proses pengadaan melalui sistem informasi pengadaan			
		- Layanan diberikan melalui portal layanan publik yang terintegrasi dengan menerapkan manajemen layanan berdasarkan pedoman			
	C	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan PBJ			
		- Memberikan layanan literasi SPBE, peningkatan kapasitas ASN penyelenggara SPBE dan kolaborasi SPBE, Layanan diberikan melalui portal layanan publik yang terintegrasi dengan menerapkan manajemen layanan berdasarkan pedoman			
	D	Meningkatnya efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan			
		- Memberikan layanan advokasi dan penyelesaian masalah pengadaan berbasis elektronik yang terintegrasi			
4	Aplikasi SPBE				
	A	Peningkatan kualitas implementasi regulasi PBJ			
		- Penguatan Portal layanan publik terintegrasi untuk memfasilitasi survey implementasi regulasi PBJ			
	B	Peningkatan akuntabilitas proses pengadaan melalui sistem informasi pengadaan			
		- Penguatan Portal layanan publik terintegrasi untuk meningkatkan			

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target
				2023	2024
		akuntabilitas proses pengadaan melalui sistem informasi			
	C	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan PBJ			
		- Dukungan aplikasi untuk memberikan layanan literasi SPBE, peningkatan kapasitas ASN penyelenggara SPBE dan kolaborasi SPBE			
	D	Meningkatnya efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan			
		- Penguatan Portal layanan publik untuk meningkatkan efektivitas advokasi dan penyelesaian pengadaan.			
5	Infrastruktur SPBE				
	A	Peningkatan kualitas implementasi regulasi PBJ			
		- Dukungan server yang memadai			
		- Dukungan koneksi internet yang memadai			
	B	Peningkatan akuntabilitas proses pengadaan melalui sistem informasi pengadaan			
		- Dukungan server yang memadai			
		- Dukungan koneksi internet yang memadai			
	C	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan PBJ			
		- Dukungan server yang memadai			
		- Dukungan koneksi internet yang memadai			
	D	Meningkatnya efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan			

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target
				2023	2024
	-	Dukungan server yang memadai			
	-	Dukungan koneksi internet yang memadai			
6	Keamanan SPBE				
	A	Peningkatan kualitas implementasi regulasi PBJ			
	-	Dukungan keamanan SPBE yang memadai			
	B	Peningkatan akuntabilitas proses pengadaan melalui sistem informasi pengadaan			
	-	Dukungan keamanan SPBE yang memadai			
	C	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan PBJ			
	-	Dukungan keamanan SPBE yang memadai			
	D	Meningkatnya efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan			
	-	Dukungan keamanan SPBE yang memadai			
7	Audit TIK				
	A	Peningkatan kualitas implementasi regulasi PBJ			
	-	Audit TIK SPBE yang memadai			
	B	Peningkatan akuntabilitas proses pengadaan melalui sistem informasi pengadaan			
	-	Audit TIK SPBE yang memadai			
	C	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan PBJga			
	-	Audit TIK SPBE yang memadai			

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target
				2023	2024
	D	Meningkatnya efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan			
	-	Audit TIK SPBE yang memadai			
No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target
				2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatkan kualitas penerapan tata kelola internal LKPP					
Indikator	Nilai RB				80.10%
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE LKPP: Layanan Publik Sektoral SPBE yang Terintegrasi					
1 Tata Kelola SPBE					
	A	Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP			
	-	Kebijakan Penyelenggaraan SPBE			
		Penyusunan dan Penetapan Penyelenggara SPBE LKPP		1 SK Tim	
		Penyusunan dan Penetapan Tim Asesor Internal SPBE LKPP		1 SK Tim	
		Reviu Kebijakan Penyelenggaraan SPBE LKPP		Belum Dilakukan	1 Dokumen Reviu
		Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE LKPP Tahun 2023-2024		1 Rancangan	
		Penyusunan Roadmap IT, Arsitektur, dan Peta Rencana SPBE LKPP Tahun 2025-2029		Belum Dilakukan	1 Rancangan
	-	Kebijakan Layanan SPBE Integrasi			
		Penyusunan Layanan Publik Terintegrasi			
		Penetapan Layanan Publik Terintegrasi			
		Penyusunan dan Penetapan Walidata dan Produsen Data LKPP		1 SK Tim	

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target
				2023	2024
	-	Pedoman Audit Internal TIK			
		Penyusunan Pedoman Audit Internal TIK		1 Rancangan	
		Penetapan Pedoman Audit Internal TIK			1 Pedoman
	-	Kebijakan Satu Data di LKPP			
		Penyusunan dan Penetapan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral LKPP		1 SK Tim	
		Penyusunan Surat Edaran Sekretaris Utama LKPP tentang kegiatan Statistik Sektoral di LKPP			1 Rancangan
		Penyusunan Peraturan LKPP tentang Satu Data			1 Rancangan
		Penyusunan Keputusan Kepala LKPP tentang Tim Koordinasi Penyelenggara Forum Satu Data			1 Rancangan
	-	Penyusunan Proses Bisnis			
		Penyusunan dan Penyesuaian Proses Bisnis dengan Perubahan SOTK			1 Rancangan
		Penyusunan Proses Bisnis Layanan Publik Terintegrasi			1 Rancangan
	-	Penyusunan SOP			
		Penyesuaian SOP dengan perubahan SOTK			100%
		Penyelarasan SOP dengan Proses Bisnis			100%
		Penyusunan SOP Layanan Publik Terintegrasi			1 Rancangan
	-	Pemantauan dan Evaluasi SPBE			
		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan SPBE			1 Laporan Kegiatan

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target
				2023	2024
		Pemantauan dan Evaluasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE			1 Laporan Kegiatan
		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan SPBE			1 Laporan Kegiatan
		Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran SPBE			1 Laporan Kegiatan
2	Manajemen SPBE				
	A	Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP			
		- Penyusunan Pedoman Manajemen SPBE			
		Pedoman Manajemen Risiko			1 Rancangan
		Pedoman Manajemen Data			1 Rancangan
		Pedoman Manajemen Layanan			1 Rancangan
		Pedoman Manajemen SDM TIK			1 Rancangan
		Pedoman Manajemen Aset TIK			1 Rancangan
		Pedoman Manajemen Pengetahuan			1 Rancangan
		Pedoman Manajemen Perubahan			1 Rancangan
		Pedoman Manajemen Keamanan Informasi			1 Rancangan
		- Penerapan Manajemen SPBE			
		Penerapan Manajemen Risiko			1 Laporan Kegiatan
		Penerapan Manajemen Data			1 Laporan Kegiatan
		Penerapan Manajemen Layanan			1 Laporan Kegiatan
		Penerapan Manajemen SDM TIK			1 Laporan Kegiatan
		Penerapan Manajemen Aset TIK			1 Laporan Kegiatan

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target
				2023	2024
		Penerapan Manajemen Pengetahuan			1 Laporan Kegiatan
		Penerapan Manajemen Perubahan			1 Laporan Kegiatan
		Penerapan Manajemen Keamanan Informasi			1 Laporan Kegiatan
3	Layanan SPBE				
	A	Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP			
		- Layanan Informasi Publik Terintegrasi			
		Pengembangan Layanan Informasi Publik			1 Laporan Kegiatan
		Penerapan Layanan Informasi Publik			1 Laporan Kegiatan
		- Layanan E-Learning Terintegrasi			
		Penyusunan Desain Layanan Portal dan website LKPP			1 Laporan Kegiatan
		Penyusunan Desain Layanan Elearning			1 Laporan Kegiatan
		- Layanan Helpdesk terintegrasi			1 Laporan Kegiatan
		- Layanan survei terintegrasi			1 Laporan Kegiatan
4	Aplikasi SPBE				
	A	Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP			
		- Aplikasi Portal dan Website LKPP			
		Pengembangan aplikasi portal dan website LKPP terintegrasi		1 Laporan Pembangunan	1 Laporan Pengembangan

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target
				2023	2024
		Penerapan integrasi konten			1 Laporan Kegiatan
		- Aplikasi e-learning terintegrasi			
		Pengembangan aplikasi e-learning		Belum Dilakukan	1 Laporan Pengembangan
		Penerapan integrasi konten e-learning		Belum Dilakukan	1 Laporan Kegiatan
		- Aplikasi Helpdesk Terintegrasi			
		Penerapan Integrasi Helpdesk		Belum Dilakukan	1 Laporan Kegiatan
		- Aplikasi Data Warehouse			
		Pembangunan Data Warehouse/Big Data Walidata LKPP		Belum Dilakukan	1 Laporan Pembangunan
		Penerapan Data Warehouse/Big Data Walidata LKPP		Belum Dilakukan	1 Laporan Kegiatan
		- Peningkatan kapabilitas Aplikasi Eksisting			
		Perbaiki Sistem Informasi bagi SDM dan Kelembagaan PBJ		1 Laporan Kegiatan	
		Perbaiki aplikasi sistem informasi model kematangan UKPBJ (SIMKU) Tahun 2023.		1 Laporan Kegiatan	
		Perbaiki fitur terkait JF PPBJ pada portal PPSDM (ppsdm.lkpp.go.id)		1 Laporan Kegiatan	
		Perbaiki fitur sertifikat pelatihan PBJ pada portal PPSDM (ppsdm.lkpp.go.id)		1 Laporan Kegiatan	
		Perbaiki aplikasi perpindahan (perpindahan.lkpp.go.id).		1 Laporan Kegiatan	
		Pengembangan sistem informasi sertifikasi PBJ TA 2023 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.		1 Laporan Pengembangan	

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target
				2023	2024
		Pengembangan aplikasi JDIH		1 Laporan Pengembangan	1 Laporan Pengembangan
		Pengembangan Layanan Sistem Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan		Belum Dilakukan	1 Laporan Pengembangan
		Pengembangan Layanan Sistem Hukum dan Penyelesaian Sanggah		Belum Dilakukan	1 Laporan Pengembangan
		Pengembangan Layanan Sistem Pengembangan dan Pembinaan SDM PBJ		1 Laporan Pengembangan	1 Laporan Pengembangan
		Pengembangan Layanan Sistem Manajemen Perkantoran Terintegrasi		1 Laporan Pengembangan	1 Laporan Pengembangan
		Pengembangan Layanan Sistem Audit dan Monitoring		1 Laporan Pengembangan	1 Laporan Pengembangan
		- Aplikasi Pendukung			
		Lisensi <i>Software Developer</i>		14 Lisensi	14 Lisensi
		<i>Service Mail Blasting</i>		1 Lisensi	1 Lisensi
		Lisensi <i>Office Processing Tools</i>		634 Lisensi	634 Lisensi
		Lisensi <i>Tools Visualisasi Data Pengadaan LKPP</i>		Belum Dilakukan	1 Lisensi
5	Infrastruktur SPBE				
	A	Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP			
		Revitalisasi Ruang Data Center (AC Data Center)		3 Kegiatan	4 Kegiatan
		Penambahan Kapasitas Pengolahan Server (Memory Server DDR4)		64 GB	16 GB

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target
				2023	2024
		Peningkatan Kinerja Jaringan (Sewa Internet Backup)		200 Mbps	200 Mbps
6	Keamanan SPBE				
	A	Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP			
		- Peningkatan Keamanan Jaringan (Lisensi keamanan jaringan)		3 Lisensi	3 Lisensi
		Lisensi Antivirus		251 Lisensi	30 Lisensi
		Konsultasi dan Evaluasi Keamanan Siber SPBE, (Konsultan Keamanan Siber)		3 Kegiatan	3 Kegiatan
7	Audit TIK				
	A	Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP			
		- Audit Keamanan Aplikasi		1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan
		- Audit Jaringan Intra		Belum Dilakukan	1 Laporan Kegiatan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI